

# GERAKAN SOSIAL POLITIK PKI DI SURABAYA 1951 - 1966

## SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam

PUSHTAKA IN	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURABAYA	
No. KLASIFIKASI	A-2003/SPI/048
K	
A-2003	
048	
SPI	TANGGAL

Oleh :

**AHMAD READI**  
NIM : AO.23.96.081

*Partai Komunis Indonesia*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ADAB  
JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM  
2003

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**GERAKAN SOSIAL POLITIK PKI DI SURABAYA 1951 – 1966**

Skripsi oleh Ahmad Readi ini telah diperiksa dan disetujui  
untuk diujikan

Surabaya, 15 Agustus 2003

Dosen Pembimbing



Drs. H. ABD. AZIZ MEDAN, M. Ag.  
NIP : 150221316

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji  
Surabaya, 16 Agustus 2003

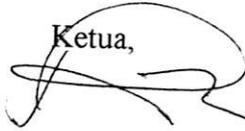
Mengesahkan ;  
Fakultas Adab  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



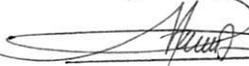
Prof. Dr. H. Burhan Djamiluddin, M.A.  
NIP : 150207791

Ketua,



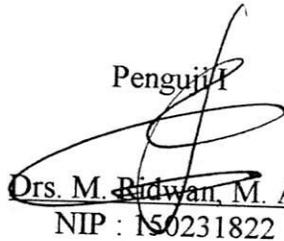
Drs. H. Abd. Aziz Medan, M. Ag.  
NIP : 150221316

Sekretaris,



Drs. Moh. Kurjum, M. Ag.  
NIP : 150269565

Penguji I



Drs. M. Bidwan, M. Ag.  
NIP : 150231822

Penguji II



Drs. H. Achmad Zuhdi DH, M. Fil. I.  
NIP : 150249900

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Lingkup Permasalahan .....	6
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Arti Penting Penelitian .....	9
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	10
F. Landasan Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : SEJARAH PEMBENTUKAN PKI</b>	
A. Masa Kolonial .....	15
B. Pasca Kemerdekaan .....	25

**BAB III : STRUKTUR ORGANISASI POLITIK PKI DAN KONDISI  
SOSIAL POLITIK DI SURABAYA**

A. Gambaran Umum Kekuatan Politik PKI di Surabaya ..... 28

B. Kelas Sosial Masyarakat Dalam Perspektif PKI Dan Sasaran  
Politiknya di Surabaya ..... 32

C. Visi Dan Misi PKI ..... 41

D. Struktur Organisasi Politik CC PKI ..... 44

E. Strategi PKI Dalam Mobilisasi Massa ..... 46

F. Aksi Sepihak PKI di Surabaya ..... 51

**BAB IV : ANALISA**

A. Komunisme vs Agama : Ideologi-Ideologi Perjuangan  
Kemerdekaan ..... 56

B. Cita-Cita PKI : Sketsa Utopisme Sosial Politik ..... 58

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 66

B. Saran-Saran ..... 70

## BAB I

### PENDAHULUAN



#### A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan nasional yang biasanya dikatakan sebagai kebangkitan bumiputera dimulai sejak awal abad XX. Secara struktural-fungsional, kebangkitan tersebut diawali dengan terbentuknya Boedi Oetomo pada Mei 1908, sebuah organisasi elite yang secara kultural menjadi eksklusif karena dominasi priyayi Jawa.<sup>1</sup> Selanjutnya SI (1911) menjadi corong pergerakan Islam pertama yang mempunyai pengaruh besar atas perkembangan organisasi pergerakan dimasa-masa sesudahnya. Diantara tokoh pergerakan yang dibesarkan oleh SI antara lain Abdoel Moeis, Suwardi Surjaningrat, H. Agus Salim<sup>2</sup>, dan Soekarno, yang juga dibesarkan dalam kalangan aktifis-aktifis pergerakan tersebut.<sup>3</sup> Sejak itu diseluruh Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru dikalangan elite terpelajar, yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan, Sarekat Ambon (1920), Jong Java (1918), Jong Pasundan (1914), Sumateranen Bond (1918), Jong Minahasa (1918), Timorsch Bond (1921), Kaum Betawi (1923), dan Pakempalan Politik Katolik Jawa (1925).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak : Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 – 1926* (Jakarta : Grafiti, 1997), 46.

<sup>2</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam* (Jakarta : LP3ES, 1996), 123.

<sup>3</sup> Cindy Adams, *Bung Karno : Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Jakarta : Tema Baru, 2000), 53.

<sup>4</sup> MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), 254.

Tetapi secara teknis operasional, kebangkitan nasional sesungguhnya telah dimulai dengan sistematis akibat adanya kebijakan politik Etis yang melahirkan pendidikan bagi bumiputera. Pendidikan menumbuhkan sikap kritis dan semangat anti kolonialisme, maka terbitlah fajar baru bagi langkah awal untuk dimulainya sebuah revolusi, menuju kemerdekaan Indonesia dalam arti yang setelanjang-telanjangnya.

Tidak terkecuali dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), ia juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan konsep dan aplikasinya sendiri. Mengapa PKI saya sebut turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ? paling tidak hal itu bisa dilihat dari dua pemberontakannya pada masa-masa awal kebangkitan nasional : pertama, di Banten, Batavia, dan Priangan pada malam hari tanggal 12 November 1926 ; kedua, di Sumatera pada 1 Januari 1927.<sup>5</sup>

Perjuangan PKI melawan pemerintah kolonial tersebut akhirnya harus diakhiri dengan "Perintah Mahkamah Agung Hindia Belanda tertanggal 17 November 1926 untuk menangkap semua orang PKI. Akibatnya 13.000 orang ditahan, 4.500 dipenjarakan dan 1.380 orang dibuang ke Digul.<sup>6</sup> Pemberontakan atau aksi sepihak yang dilakukan PKI diberbagai daerah menunjukkan sikap anti kemapanan yang radikal. Dalam arti sempit menandakan ketidakpuasan PKI atas penerapan sistem politik Hindia Belanda, dan ingin mengubahnya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 272.

<sup>6</sup> Arbi Sanit, *Badai Revolusi : Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 51.

Bukti lain adalah, Tan Malaka, seorang yang dikenal sebagai tokoh PKI – karena aktifitas dan pandangan politiknya cenderung kekiri-kirian, diangkat sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1963.<sup>7</sup>

Kegagalan PKI pada kudeta 1926/1927 tersebut menjadi titik tolak kesadaran pergerakan nasional bahwa jalan menuju kemerdekaan Indonesia bukan utopia belaka. Karena keberanian PKI untuk melakukan pemberontakan menimbulkan image bahwa pemerintah Hindia Belanda bisa diserang dan bahkan ditaklukkan.

Meski kemudian PKI vacuum dalam kegiatan politik pergerakan setelah kegagalan itu, ia tidak mati. Sebagai ideologi pembebasan (anti kemapanan) ia tetap hidup dalam jiwa-jiwa revolusioner, ia tetap terstruktur dalam otak-otak Marxian. Secara organisatoris, ia mati, atau lebih tepat jika dikatakan ia tidur, hampir dua puluh tahun.

April 1935 Muso kembali dari Rusia dan di Surabaya ia membentuk PKI bawah tanah.<sup>8</sup> Segera ia membenahi strategi partai, konsep yang lebih konkrit berkat pengalamannya di Rusia dan negara-negara Komunis lainnya.

Tokoh PKI lainnya yang dengan terang-terangan mendirikan PKI pasca kemerdekaan ialah Mohammad Jusuf. Ia meresmikan kembali PKI sebagai partai

---

<sup>7</sup> Harry A. Poeze, *Tan Malaka : Pergulatan Menuju Republik 1897 – 1925* (Jakarta : Grafiti, 2000), hal. Pengantar Penerbit.

<sup>8</sup> Sanit, *Badai Revolusi...*, 52.

yang bergerak secara legal pada 21 Oktober 1945 dengan menggabungkan PKI bentukan Subardjo dan PKI bentukan Muso.<sup>9</sup>

Pada tanggal 18 September 1948 PKI menguasai Madiun, membunuh para tokoh yang pro pemerintah dan mengumumkan melalui radio bahwa suatu pemerintahan Front Nasional telah terbentuk.<sup>10</sup> Dan lagi-lagi Muso menjadi aktor intelektual dari pemberontakan tersebut.

Setelah melalui proses dan tahapan-tahapan yang rumit, dari perundingan ke perundingan, akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 negeri Belanda secara resmi mengakui kedaulatan RI, tidak termasuk Irian Jaya. Mulailah babak baru dalam sejarah politik (demokrasi) Indonesia, yakni sejak 1950 – 1957.<sup>11</sup> Dalam arti, bangsa Indonesia mulai menapakkan langkahnya diatas bumi pertiwi dengan kuasa sendiri. Pelan-pelan pembangunan disegala bidang digalakkan taanpa campur tangan pihak

asing.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tulisan ini mengangkat perjalanan PKI pasca kegagalan Muso memimpin revolusi sovietnya di Madiun pada September 1948. Dengan lain perkataan sejak terpilih nya Aidit dalam kongres keempat, sidang pleno CC PKI pada tahun 1951, menjadi Ketua.<sup>12</sup> Hingga ditetapkannya Ketetapan No. XXV/MPRS/1966 juncto

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>10</sup> MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia....*, 344 – 345.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 355.

<sup>12</sup> Zulfikar Ghazali, "Pola Kepemimpinan PKI 1945 – 1966", dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis : Kumpulan Tulisan Terpilih Tentang Gerakan Komunis dan Bahaya Ekstrem lainnya di Indonesia* (Jakarta : Intermasa, 1997), 162. Bandingkan dengan Arbi Sanit, *Ibid.*, 53.

Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 yang berarti meniadakan basis legalitas gerakan Komunis di Indonesia.<sup>13</sup>

Tulisan ini mencoba menyoroti strategi Aidit dalam mengkonsolidasi dan memobilisasi massa diperkotaan, khususnya di Surabaya untuk melancarkan aksi sepihak dengan menyerobot tanah-tanah milik tuan tanah sebagai pelaksanaan landreform.

Sebagai penganut murni ajaran Marxis-Leninisme, PKI mempunyai obyek sasaran, yakni buruh dikota dan petani didesa. Pada masa inilah (1960 –1963) PKI beserta Ormas-Ormas pendukungnya bergerak sedemikian mobil, akseleratif dari desa kekota atau sebaliknya, dalam upaya menggalang kekuatan massa dan sangat bersikap reaksioner, konservatif atas kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>14</sup>

Surabaya sebagai tempat lahirnya Komunis yang pertama, sebelum menginfiltrasi SI Semarang. Pada tahun 1913, Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet seorang Belanda tiba di Surabaya dan mendirikan Indische Social Democratische Vereniging (ISDV : Perserikatan Sosial Demokrat Hindia).<sup>15</sup> – mempunyai basis massa buruh yang tidak sedikit, sehingga PKI periode Aidit (temporal dalam kajian ini), memberi perhatian lebih pada kota ini. Dan terbukti pada Pemilu 1955, perolehan suara PKI di Surabaya adalah nomor dua setelah NU.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Tim Pokja DITSUS LEMHANNAS, "Ancaman Bahaya Laten Komunis Terhadap Kehidupan Pancasila Dan Pembanguna Nasional", dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional...*, 346.

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, *Indonesian Historiography* (Yogyakarta : Kanisius, 2000), 122.

<sup>15</sup> MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia...*, 260. Bandingkan dengan Soetopo Soetanto, "PKI dan Gerakan Komunis Internasional", dalam, Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional...*, 171.

<sup>16</sup> Sanit, *Badai Revolusi...*, 163.

Munculnya PKI yang kedua juga di Surabaya, yakni pada April 1935 oleh veteran pemberontak 1926/1927 seperti Muso, Semaun, dan Alimin dengan membentuk PKI bawah tanah (ilegal).<sup>17</sup>

Sebagai gambaran maka perlu kami sajikan tabel perolehan suara PKI dalam pemilu 1955 di Jawa Timur<sup>18</sup> :

Keresidenan	Partai Islam bersama-sama		PKI		PNI		Lain-lain		Jumlah	
	Pemilih	%	Pemilih	%	Pemilih	%	Pemilih	%	Pemilih	%
Madiun	305.501	3,1	564.625	5,8	322.608	3,3	109.047	1,1	1.306.781	13,3
Kediri	541.813	5,5	508.597	5,2	478.747	4,8	137.248	1,4	1.666.405	16,9
Bojonegoro	522.973	5,3	304.757	3,0	168.243	1,8	57.553	0,5	1.053.526	10,7
Malang	847.416	8,6	307.546	3,1	501.434	5,7	151.239	1,5	1.807.635	18,3
Besuki	883.729	8,9	239.137	2,4	391.942	3,9	108.380	1,1	1.623.188	16,3
Surabaya	640.048	6,5	365.852	3,7	297.699	3,0	148.416	1,5	1.452.115	14,7
Madura	772.156	7,8	4.084	0,1	90.336	0,9	99.484	1,0	966.060	9,8
Jawa Timur	4.513.636	45,7	2.299.598	23,3	2.251.009	22,8	811.367	8,2	9.875.610	100

Tabel diatas menyimpulkan PKI menjadi partai terbesar kedua setelah partai-partai Islam (Masyumi, NU) di Jawa Timur secara keseluruhan dan di Surabaya khususnya.

## B. Lingkup Permasalahan

PKI dalam khazanah sejarah kita menjadi lembaran hitam yang tidak bisa dilupakan begitu saja. mengingat bias Komunisme bukan hanya menjadi isu nasional tapi bahkan kesemua penjuru dunia. Sebagai sistem filsafat, Marxis tetap mendapat tempat dalam kajian-kajian filsafat abad XIX hingga abad modern. Pun, sebagai

<sup>17</sup> *Ibid*, 52.

<sup>18</sup> Sumber : Panitia Pemilihan Indonesia-Jakarta, yang dikutip dari Sanit, *Badai Revolusi...*, 191.

sebuah ideologi tandingan (versus Kapitalisme), Marxis masih mendapat simpati, seperti Cina, Korea Utara, Cuba, Hongaria, Polandia, Jerman Timur, dan lain-lain.

Revolusi Bolshevik menjadi sumber inspirasi yang meyakinkan dari setiap gerakan Komunis didunia. Terlebih bagi negara yang tertekan oleh penjajahan. Atau keadaan dimana kehidupan ekonomi rakyat tidak mampu menciptakan kesejahteraan, akibat berkembangnya Kapitalisme. Kenyataannya, Komunisme termasuk organ vital bagi kemerdekaan negara-negara dunia ke III di Asia Tenggara (negara yang lahir pasca PD II). Cina dengan Mao Zedong, Vietnam dengan Ho Chi Minh, Burma dengan Dr. Ba Mau, Filipina dengan Huk Ba Lahap dan Indonesia dengan Semaun, Muso dan Tan Malakanya.

Sehingga, kajian mengenai Marxisme (Komunisme) selalu aktual. Mengingat, yang menarik dari Komunisme ialah doktrinnya tentang revolusi. Boleh dikatakan, dimanapun dan dengan latar kebudayaan seperti apapun, Komunisme tumbuh maka revolusi (pemberontakan) akan bergolak.

Marilah kita tilik tulisan-tulisan elite PKI sejak awal berdirinya hingga dianggap organisasi terlarang. Sneevliet menulis :

“Telah berabad-abad disini hidup berjuta-juta rakyat yang menderita dengan penuh kesabaran dan keprihatinan, dan sesudah Diponegoro tiada seorang pemuka yang *mengerahkan massa* ini untuk menguasai nasibnya sendiri. Wahai rakyat di Jawa, Revolusi Rusia juga merupakan pelajaran bagimu. Juga rakyat Rusia sejak berabad-abad mengalami penindasan tanpa perlawanan, miskin dan buta huruf seperti kau. Bangsa Rusiapun memenangkan kejayaan hanya dengan perjuangan terus-menerus melawan pemerintah paksaan yang menyesatkan. Juga di Rusia sarekat-sarekat buruh dipimpin oleh pemerintah. Kebaktian kepada kemerdekaan adalah kebaktian yang berat. Kebaktian itu tida mengijinkan kelemahan, rasa tajut, keraguan, ketidakpastian. Kebaktian itu menghendaki keseluruhan kepribadian, keberanian. Apakah lonceng

kegembiraan sekarang juga menggema didalam hati kita ? Apakah penabur dari benih propaganda untuk politik radikal dan gerakan ekonomi rakyat di Indonesia memperlipat kegiatannya ? Dan tetap bekerja dengan tidak henti-hentinya, meskipun banyak benih jatuh diatas batu karang dan nampak hanya sedikit yang tumbuh ? Dan tetap bekerja melawan segala usaha penindasan dari gerakan kemerdekaan ini ? Maka tidak bisa lain bahwa rakyat di Jawa, diseluruh Indonesia akan menemukan apa yang telah ditemukan oleh rakyat Rusia : kemenangan yang gilang gemilang”<sup>19</sup>.

Tulisan Sneevliet ini provokatif dan menjadi doktrin revolusi bagi penerus PKI di masa selanjutnya. Konsep Muso yang tertuang dalam tulisannya “Jalan Baru Untuk Republik Indonesia”, menghendaki kaum Komunis merebut kekuasaan<sup>20</sup>, merupakan perkembangan dari konsep Sneevliet tentang penggulingan kekuasaan.

Konsep revolusi komunis yang secara eksplisit diperlihatkan adalah konsep Aidit dalam Kongres ke-5 PKI, yang mengemukakan bahwa revolusi Indonesia harus menempuh tiga jalan yang diberi nama Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) yang meliputi :

1. Bekerja dan melakukan gerilya dipedesaan, terutama buruh dan tani.
2. Mengadakan aksi buruh dikota terutama buruh transport.
3. Bekerja dengan baik dikalangan ABRI.<sup>21</sup>

Fokus dari kajian ini, bertitik tolak dari konsep Aidit yang kedua tersebut diatas, yaitu bagaimana PKI menguasai massa buruh perkotaan dan mampu menerima doktrin-doktrin komunis serta penerapannya dilapangan.

<sup>19</sup> Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional...*, xii.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 186

<sup>21</sup> *Ibid.*, 58.

Masa 1951 – 1966 yang dipilih penulis didasarkan atas terpilihnya Aidit sebagai Ketua dalam sidang pleno CC PKI tahun 1951, hingga ditetapkannya Ketetapan No. XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR No. V/MPR/1973.

### **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini ialah gerakan – gerakan PKI di Surabaya dan perkembangannya dari tahun 1951 sampai tahun 1966. Kajian mengenai gerakan ini difokuskan terhadap permasalahannya dibidang sosial dan politik. Untuk penjabaran peristiwa-peristiwa dan penjelentrehan permasalahan tersebut, maka dikemukakan pertanyaan-pertanyaan utama sebagai berikut ;

1. Bagaimana strategi politik PKI di Surabaya ?
2. Siapa sasaran-sasaran agitasi dan propaganda PKI di Surabaya dari 1951 – 1966 ?
3. Bagaimana aksi-aksi sepihak yang dimotori PKI di Surabaya ?

### **D. Arti Penting Penelitian**

Sejarah mengenai pemberontakan PKI bukanlah sesuatu yang baru dalam konteks keilmuan. Melalui berbagai tulisan baik dari sejarawan dalam dan luar negeri maupun terbitan-terbitan yang dikeluarkan pemerintah berupa peringatan bahaya *laten* Komunis sering dilakukan. Namun pergolakan sosial-politik PKI didaerah tak banyak yang diangkat.

Bertolak dari asumsi bahwa Surabaya mempunyai dua sisi menarik dibidang sosial, yakni lalu lintas perdagangan dan industri yang sudah ramai sejak abad XIX, disatu sisi dan merupakan salah satu kantong kaum agama (NU), disisi lain, maka kajian ini memiliki arti penting bagi penyelidikan sejarah sosial yang bersifat lokal. Dua kenyataan diatas memberi alasan sosio-kultural mengapa pada Pemilu 1955, PKI mampu menjadi nomor dua setelah NU di Surabaya.

Dua hal tersebut memiliki akses yang tidak kecil, karena ditingkat lokal, Pemuda Anzor (Organisasi mantel NU) dan BTI/PKI kerap kali terjadi konfrontasi fisik. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada bab tiga.

Sebuah kenyataan lain yang mencengangkan adalah bahwa lahirnya PKI sejak pertama hingga tumbuh menjadi besar ialah di Surabaya. Ini dimungkinkan karena pemikiran mengenai mengenai ketertindasan kaum proletar oleh kaum kapitalis mudah sekali terlihat dikota besar seperti Surabaya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi semacam pengantar bagi penulisan sejarah PKI dikota perdagangan yang lain.

#### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai gerakan politik PKI banyak dilakukan para sarjana luar dan dalam negeri. Tulisan Hermawan Sulistyono, **Palu Arit di Ladang Tebu : Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965 – 1966)**, membahas dalang dari

Pemberontakan PKI 1965. Ia mengemukakan lima skenario mengenai dalang PKI tersebut. Yaitu, PKI, Sukarno, Suharto, TNI – AD, dan CIA.<sup>22</sup>

Tulisan ini menjelaskan dan mengkaji aksi-aksi sepihak (landreform) PKI di Surabaya dari sudut pandang sosial politik sebagai salah satu rangkaian peristiwa yang terjadi hampir serentak dan berurutan diseluruh daerah di Jawa Timur.

Mengenai pergerakan PKI dipedesaan telah dilakukan secara komprehensif oleh Arbi sanit dalam karyanya, **Badai Revolusi : Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Timur dan Jawa Tengah**, karya ini penelitian gerakan PKI dipedesaan bukan perkotaan. Sebuah kajian yang penuh dengan data akurat dan faktual, mengenai kekuatan politik PKI di pedesaan serta berbagai strateginya.

Aminuddin Kasdi dalam bukunya, **Kaum Merah Menjarah : Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960 – 1965**, juga equivalen dengan karya Arbi Sanit diatas, yakni mengenai pergerakan politik PKI di pedesaan. Dengan demikian perkotaan menjadi terabaikan secara metodis.

Semua karya hasil penelitian sejarawan akademik diatas merupakan karya besar dengan tema umum yang meliputi satu kesatuan administratif (Jawa Timur – Jawa Tengah) bukan satu kesatuan geografis dengan ikatan sosial ekonomi yang menunjukkan satu daerah saja yaitu kota. Lingkup kajian demikian biasanya thesis atau disertasi. Sedangkan pada tingkat S1 (skripsi) kajian daerah/kota yang lebih spesifik baru kali ini dilakukan.

---

<sup>22</sup> Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu : Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan* (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2000).

## F. Landasan Teoritis

Sebagaimana diketahui, PKI memiliki basis massa baik didesa dan dipertanian. Dipedesaan PKI mempropaganda petani dengan mendirikan BTI (Barisan Tani Indonesia) dan SAKTI (Sarikat Tani Indonesia). Sedangkan masyarakat kota yang menjadi sasaran PKI adalah para buruh pabrik dan kereta api.

Selanjutnya, misi PKI ialah menggerakkan mereka (massa perkotaan) untuk melakukan aksi massa untuk menuntut pembebasan tanah (landreform) sebagai sarana menciptakan masyarakat komunis Indonesia yang tanpa kelas. Dalam hal inilah, para agitator PKI melalui semua organisasi mantelnya (Lekra, BTI, SOBSI, dll) melakukan provokasi ditingkat Komite Seksi diseluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah.<sup>23</sup>

Dasar-dasar pemikiran diatas, dipandang cukup untuk dijadikan acuan dalam studi ini, sehingga kajiannya dapat mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan sosial-politik PKI di Surabaya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Kondisi sosial-politik ini sengaja diambil karena dapat menjadi pendekatan struktural fungsional secara historis. Artinya, kajian mengenai PKI dengan sendirinya akan mengarah juga pada persoalan sosial dan politik sekaligus.

Faktor sosial-politik nasional jugalah yang akhirnya membunuh perkembangan PKI pada kurun setelah kurun waktu yang telah ditetapkan.

---

<sup>23</sup> DS. Moeljanto, et.al., *Prahara Budaya : Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI DKK* (Bandung : Mizan, 1995), 32 – 39.

## G. Metode Penelitian

Karya tulis ini menggunakan kaidah-kaidah penulisan sejarah dengan pendekatan ilmu sosial, karena menyangkut jangkauan waktu (diakronis) tertentu, yakni 1951 – 1966 yang sekaligus memuat kandungan sosial (sinkronis).<sup>24</sup>

Generalisasi yang sudah atau kemudian timbul adalah deduktif. Penulis mengambil keumuman sifat dan karakteristik filsafat Marxisme kemudian menyimpulkan aksi sepihak PKI di Surabaya sebagai bagian integral atau sebuah konsekuensi logis implementasi filosofi komunis sebagai suatu ideologi. Perkembangan selanjutnya, dari keumuman tersebut, maka setiap gerakan komunis (revolusi komunis) merupakan – dalam bahasa yang sering digunakan Marx – “keharusan sejarah”.

Mengenai urutan dalam kaidah-kaidah penulisan sejarah yang penulis lakukan pertama ialah pemilihan topik. Dilanjutkan dengan pengumpulan sumber, tentu yang berkaitan dengan materi. kemudian verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber). Kritik dibagi dua, yakni kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern yang penulis gunakan adalah dengan meneliti apakah sebuah sumber itu ditulis oleh orang yang memang ahli dibidang sejarah ?! Bukan dari disiplin ilmu yang lain ?! Jika bukan hasil tulisan sejarawan maka penulis tinggalkan dan sebisa mungkin mengambil refrensi karya sejarawan.

Sedangkan kritik intern (kritik terhadap isi buku), penulis meninggalkan dua pendapat (kalau tidak dikatakan interpretasi) yang berlainan. Penulis mengambil

---

<sup>24</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta : Bentang, 1999), 115.

interpretasi yang paling umum dan banyak disepakati oleh para sejarawan. Tahap selanjutnya adalah interpretasi : analisis dan sintesis, kemudian penulisan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penyajian penelitian ini dibagi menjadi 3 kerangka besar : Pengantar, Hasil Penelitian, dan Simpulan. Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas, latar belakang masalah, rumusan masalah, lingkup permasalahan, arti penting penelitian, tinjauan pustaka terdahulu, landasan teoritis, metode penelitian, dan kini sistematika penulisan serta refrensi.

Hasil penelitian disajikan dalam empat berikutnya, sebagai satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Pada bab kedua dipaparkan pokok bahasan menyangkut sejarah pembentukan PKI sejak masa kolonial sampai masa pasca kemerdekaan. Pemaparan ini penting karena merupakan satu mata rantai yang kait digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengkait dari seluruh perjalanan PKI. Kemudian kaitannya dengan gerakan PKI dipaparkan dalam bab tiga, yaitu mengenai gambaran umum kekuatan politik, kelas sosial masyarakat Surabaya dalam perspektif PKI dan sasaran politik PKI, visi dan misi PKI, strategi PKI dalam mobilisasi massa, aksi sepihak PKI di Surabaya.

Bab keempat menganalisa gerakan sosial-politik tersebut berdasarkan interpretasi fakta dan kausalitas peristiwa. Bagian akhir merupakan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi ini, yang diharapkan dapat menarik benang merah dari uraian pada bab-bab sebelumnya menjadi suatu rumusan yang bermakna.

## BAB II

### SEJARAH PEMBENTUKAN PKI



#### A. Masa Kolonial

Partai Komunis pertama ialah Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) yang diorganisir oleh Hendricus Fransiscus Sneevliet, seorang pemimpin *Social Democratic Labor Party* di negeri Belanda. Ia datang ke Indonesia untuk mencapai kemungkinan-kemungkinan dalam hidupnya didaerah jajahan negaranya. Ia sampai pada 1913 di Surabaya dengan memakai nama samaran Maring.<sup>25</sup>

Selanjutnya ia berhasil menginfiltrasi Perserikatan Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP) dengan menjadikannya sebagai organisasi yang berhaluan sosial dan bersikap revolusioner. Pada saat VSTP ini sudah menjadi komunis, pemogokan buruh dengan motif ideologi komunis terjadi pertama kali di Hindia.

Menurut Sanit, kedatangan Sneevliet ke Indonesia tersebut karena melihat besarnya penanaman modal yang ditanam pada perusahaan-perusahaan perkebunan seperti gula, karet, tembakau, teh, perusahaan-perusahaan tambang dan sebagainya.<sup>26</sup> Jadi Sneevliet, melihat bahwa penanaman modal asing tersebut bisa menjadi alat propaganda untuk membangun masyarakat tanpa kelas dengan merobohkan kapitalisme.

---

<sup>25</sup> George Mc T. Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 72.

<sup>26</sup> Sanit, *Badai Revolusi.....*, 40

Taktik infiltrasi yang dilakukan Sneevliet pada VSTP dianjurkan pada para pengikutnya kepada organisasi yang mempunyai basis massa yang lebih kuat, yakni dengan merangkap keanggotaan SI dan kemudian berusaha menarik anggota SI kedalam gerakan yang dipimpinya.

Kegiatan-kegiatan ISDV didalam lingkungan Sarekat Islam menggoncangkan organisasi tersebut. Anggota-anggota ISDV melancarkan strategi "Block-within", yaitu memasuki gerakan massa dan bekerja untuk merebut kekuatan dari dalam dan selanjutnya membawa mereka kearah sosialis revolusioner. Sampai kemudian terjadi perpecahan dalam tubuh SI ; timbullah SI Merah dan SI Putih.

Haji Misbach, seorang aktifis SI, wakil presiden ISDV serta pemimpin Insulinde dalam bulan Januari 1919, membentuk Persatuan Kaum Buruh dan Tani (BKBT) yang kemudian dipimpin oleh Suhardjo, seorang pemimpin SI dan ISDV  
Demak<sup>27</sup>

Dengan demikian ISDV cepat berkembang. Dan usahan ini dilengkapi pula dengan mengadakan persetujuan langsung bersama SI, yang dapat dicapai di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember 1919. Kerja sama ini menelorkan, "Persatuan Pergerakan Kaum Buruh" yang meliputi 22 Serikat Buruh dengan 72.000 anggota yang sebagian besar terdiri dari buruh Central Syarikat Islam (CSI) Semarang.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei 1920 nama ISDV diganti dengan Perserikatan Komunis di Hindia (Indie) atau PKI pada Kongres ke VII yang diadakan di Semarang. Adapun susunan pengurus PKI pada waktu itu adalah : Semaun

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 41.

(Ketua), Darsono (Wakil Ketua), Bergsma (Sekretaris), Dekker (Bendahara). Dengan kedudukan Semaun sebagai ketua tersebut maka ia ketika itu memegang jabatan dua ketua sekaligus, yaitu ketua PKI dan ketua SI cabang Semarang.<sup>28</sup>

Demikianlah embrio Partai Komunis telah lahir dan usaha menarik massa dari SI ditingkatkan terus. Sebenarnya, SI menyadari persaingan yang membahayakan dirinya. Ini dapat dilihat dari keputusan kongres SI dalam bulan Oktober 1919 yang memutuskan untuk menjadikan SI sebagai organisasi buruh dan tani.

Sejak berdirinya PKI tersebut, menurut Shiraishi, pergerakan nasional mengalami transformasi mendalam dibidang sosial politik. kenyataan ini bisa dipahami melalui dua ungkapan : "Zaman Reactie" dan "Zaman Partij". Zaman partai bangkit pada tahun-tahun tersebut.<sup>29</sup> Pada 1917 BO (Budi Oetomo), Insulinde (Perkumpulan masyarakat Indo di Hindia Belanda), dan CSI (Central Sarikat Islam) telah beralih menjadi partai-partai politik. Ketika itu mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam Volksraad (Dewan Rakyat) yang baru saja dibentuk dan menyusun program partai. Diantara program-program mereka terdapat perbedaan, tetapi secara ideologis mereka tidak bertentangan.

---

<sup>28</sup> Soetopo Soetanto, "PKI dengan Gerakan...", dalam Alex Dinuth *Kewaspadaan Nasional...*, 174.

<sup>29</sup> Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak...*, 295.

Waktu itu BO, Insulinde, dan ISDV (Indische Social Democratische Vereniging : Perserikatan Sosial Demokrat Hindia) keanggotaanya didominasi oleh orang Belanda.<sup>30</sup>

Dari partai Komunis inilah embrio Marxis-Leninisme di Indonesia tumbuh hingga berumur 45 tahun. Lahirnya partai komunis ini diakibatkan dari perbedaan tajam antara CSI dengan pihak yang beraliran kekiri-kirian.

Dalam menjalankan gerak langkahnya, Semaoen berpangkal di Semarang sebagai kota basis PKI. Kemudian bergerak dipedalam Jawa Tengah dan sekitarnya. Ini sebagai imbalan bagi CSI yang berpusat di Surabaya. Antara Surabaya dan Semarang merupakan kota-kota pelabuhan perdagangan yang mempunyai pengikut potensial dari kedua kelompok ini.

Pada masa kolonial ini, PKI menitik beratkan perhatiannya pada pedesaan, yakni dikalangan petani. Pelaksanaannya didasarkan kepada keputusan konferensi Kotagede (Jogya), Desember 1924 yang menghendaki supaya Serikat Rakyat (SR) dipergunakan untuk maksud ini.<sup>31</sup>

Strategi menguasai desa ini bukan hal kebetulan tetapi dengan pertimbangan sosial dimana rakyat Indonesia memang mayoritas petani. Selain itu petani dianggap mewakili kelas proletar yang akan menggerakkan jalannya revolusi dan perjuangan kelas.

---

<sup>30</sup> Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908 – 1918* (Jakarta : Grafiti, 1989), 225.

<sup>31</sup> Sanit, *Badai Revolusi*...., 43.

Sebagaimana Sanit yang mengutip Mc Vey, anjuran menguasai desa dan petani ini diperkuat oleh Lenin dalam kongres ke-2 Komunis International, dari tanggal 17 Juni sampai 7 Agustus 1920 di Moskow :

“Komunis Internasional sehubungan dengan masalah nasional dan kolonial, mendasarkan kekuatannya kepada kerjasama antara golongan proletariat dengan petani....., dimana mungkin petani dan golongan proletariat lainnya diorganisasi dalam soviet”<sup>32</sup>

Perkembangan PKI ini tidak disambut dengan baik oleh pemerintah Belanda, sebab PKI banyak menganjurkan pemogokan kepada organisasi-organisasi buruh yang bergabung kedalamnya seperti pemogokan buruh percetakan dan pabrik mesin di Surabaya pada 1 September 1925, dan dalam bulan Oktober tahun yang sama pemogokan buruh pelabuhan dan persatuan dok.<sup>33</sup>

Namun semuanya dapat ditindak pemerintah sehingga setelah tahun 1925 tidak terjadi pemogokan lagi dan ini berarti kegiatan orang-orang komunis dalam organisasi buruh terhenti, lebih-lebih setelah gagalnya pemberontakan komunis pada 1926.<sup>34</sup>

Demikian juga halnya di Semarang. Akibatnya dikedua kota tersebut terjadi penangkapan-penangkapan terhadap Alimin, Aliarkham, Mardjohan, dalam bulan September 1925. Sebagai usaha pencegahan terhadap bahaya pengikisan oleh pemerintah, maka pada rapat para pemimpin PKI di Batavia tanggal 22 Maret 1925 berkeputusan untuk melaksanakan sistem group (lebih kurang 10 orang) dan sistem

<sup>32</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>34</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional : Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 – 1945* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 107.

sel (lebih kurang 5 orang), sesuai dengan keputusan yang telah diambil pada bulan 1924.<sup>35</sup>

Dengan sistem sel, PKI bebas bergerak dalam partai-partai atau organisasi-organisasi yang bukan beraliran komunis. Karena strategi ini mampu memasuki berbagai organisasi non komunis (infiltrasi, penyusupan) tanpa diketahui.

Dengan sistem ini PKI dapat membantu pengawetan ajaran-ajaran komunisme dikalangan masyarakat, hingga dalam saat yang menguntungkan ia dapat bangkit kembali.

Pengejaran pemerintah kolonial Belanda terhadap pemimpin-pemimpin PKI seperti yang kita lihat diatas adalah suatu keadaan yang tidak terpisahkan dari gejala yang diperlihatkan oleh kemunculan elemen baru yang ekstrem dalam struktur pimpinan PKI. Mereka adalah group yang dipimpin oleh Alimin dan Muso yang menganjurkan gerakan revolusioner dan teror untuk mengembangkan sayap partai.<sup>36</sup>

Tantangan pemerintah Belanda ini dijawab oleh PKI dengan usaha mengorganisir partai yang bergerak dibawah tanah seperti yang diusahakan pertama kali oleh pimpinan PKI dan VSTP Semarang pada tanggal 22 Desember 1925.

Suatu keputusan rapat yang dihasilkan oleh rapat di Prambanan yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi partai, antara lain, Sarjono, Alimin, Budisutjipto, Winata, dan lain-lain, menganjurkan pemberontakan PKI pada 1926.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi.....*, 80.

Tujuan melaksanakan pemberontakan ini jelas terungkap dalam ucapan Sarjono sebagai pimpinan pusat saat itu :

“Aksi PKI dimulai dengan mogok sampai kepada kekerasan senjata yang akan mengikutkan petani dan tentara kedalam suatu revolusi komunis, lagi pula konfrensi itu sendiri menetapkan untuk mengadakan pemberontakan bersenjata yang akan dimulai di Padang, setelah itu baru di Jawa pada bulan-bulan Mei, Juni dan Juli 1926”<sup>37</sup>

Walaupun tidak disetujui oleh Moskow dan Tan Malaka namun pemberontakan terjadi juga pada daerah-daerah yang terpisah.

“Di Solo, pecah pada tanggal 17 – 23 November, di Kediri 12 November sampai 15 Desember dan di beberapa daerah lainnya ; tapi di Pekalongan, banyumas dan Kedu belum sempat terjadi karena rahasia pemberontakan bocor ketangan intelejen Belanda”<sup>38</sup>

Sementara itu di Padang, Sumatera Barat pada 3 Januari 1927, selain seorang Belanda, Leurs, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dibunuh pula beberapa guru, pegawai dinas pertanian, tukang emas, dan kepala stasiun. Seluruhnya 26 korban digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pembunuhan. Di Agam dan beberapa daerah lain, diwilayah pantai disekitar Padang dan Pariaman, terutama para kepala kampunglah yang menjadi sasaran pembunuhan.

Tindakan Belanda untuk mengakhiri pemberontakan itu juga keras. Menurut Komisaris Tinggi Inggris di Batavia, didaerah Padang saja dibunuh sedikitnya seratus orang yang dinyatakan komunis.

Menurut pihak Belanda, sekitar Agustus 1927, dipengadilan Sawahlunto saja

1. 363 orang diadili atau menunggu pengadilan. Sebanyak 3. 000 orang ditangkap,

<sup>37</sup> Sanit, *Badai Revolusi...*, 51.

<sup>38</sup> A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta : Pustaka Rakyat, 1960), 45.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

meskipun beberapa ratus diantaranya kemudian dibebaskan setelah diinterogasi. Sidang-sidang pengadilan berlangsung sampai pertengahan 1928.<sup>39</sup>

Kegiatan legal PKI pada periode ini diakhiri dengan "Perintah Mahkamah Agung Hindia Belanda tertanggal 17 November 1926 untuk menangkap semua orang-orang PKI. Akibatnya, 13.000 orang ditahan 4.500 dipenjarakan dan 1.380 orang dibuang ke Digul.<sup>40</sup>

Sebagai akibat penindasan terhadap pemberontakan PKI tersebut, pemerintah kolonial melarang PKI beserta organisasi bawahannya, untuk melakukan kegiatan kepartaian. Kemudian PKI melakukan kegiatan-kegiatannya secara tidak terang-terangan (ilegal).

Pada tahun-tahun selanjutnya, sisa-sisa PKI meneruskan kegiatan-kegiatannya dibawah tanah. Usaha sisa-sisa kaum komunis untuk bangkit kembali tersebut sejalan dengan garis Komunis Internasional. Dengan bantuan Komunis Internasional (Komintern), PKI mencoba membangun kembali aksi komunis di Indonesia dengan jalan mengadakan suatu organisasi rahasia dan akan menyelundupkan kader-kadernya kedalam organisasi-organisasi yang tidak terlarang.

Banyak pemimpinnya PKI terkemuka waktu itu lari keluar negeri seperti Muso, Alimin, Semaun di Rusia. Tetapi mereka tetap berusaha mengorganisir partai dari luar,. Sementara itu yang ditangkap menjalankan hukuman dalam penjara kolonial Belanda. Mereka yang tetap berada ditanah air dan lolos dari penangkapan

---

<sup>39</sup> P. Swantoro, *Dari Buku Ke Buku : Sambung Menyambung Menjadi Satu* (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), 322.

<sup>40</sup> Sanit, *Badai Revolusi.....*, 52.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pemerintah, mengorganisir gerakan dibawah tanah atau bergerak dan aktif dengan anggota partai atau organisasi massa. Demikianlah, mereka bergerak dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang didasarkan kepada persetujuan bersama antara Semaun dengan Hatta pada tanggal 5 Desember 1926.<sup>41</sup>

Persetujuan antara PKI dengan Perhimpunan Indonesia (PI) tersebut antara lain menentukan bahwa :<sup>42</sup>

1. PKI mengakui dan tunduk kepada pimpinan PI serta berjanji tidak melakukan oposisi terhadap usaha-usaha PI.
2. PI sebagai partai nasional bertanggung jawab penuh atas perjuangan nasional.

Tetapi ternyata kemudian kontrak itu ditiadakan oleh Semaun pada 1926.

Sebagaimana diketahui sejak permulaan organisasi PI didirikan, telah banyak orang Komunis masuk kedalamnya, yaitu mereka yang bersekolah dinegeri Belanda dan tertarik akan ajaran-ajaran Karl Marx, seperti Abdul Madjid, Suripno, Maruto Darussaman.<sup>43</sup>

Setidak-tidaknya diterimanya anggota PKI dalam organisasi dan partai bukan Komunis, didasarkan kepada pertimbangan memperkokoh diri untuk menghadapi musuh bersama yaitu pemerintah kolonial Belanda. Disamping itu pertimbangan kebangsaan merupakan salah satu aspek pula dari kerja sama itu.

---

<sup>41</sup> Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi...*, 89.

<sup>42</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme* (Jakarta : Gramedia, 1999), 151.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Didalam negeri gerakan bawah tanah masih hidup dan berkembang meski perlahan. Pada tahun 1932, mereka mengeluarkan program 18 fasal yang berisi tuntutan kebebasan berorganisasi dan memperbaiki upah buruh serta perbaikan-perbaikan kehidupan petani.<sup>44</sup>

Dari luar negeri usaha mengorganisir kembali PKI berjalan tiada henti. Pada bulan April 1935, Muso kembali dan di Surabaya ia membentuk PKI bawah tanah (illegal PKI). Disamping itu Tan Malaka juga mengorganisir gerakan dibawah tanah. Tapi karena gerakannya sangat terbatas sebagai akibat kewaspadaan PID (polisi Hindia Belanda) dan pemerintah kolonial Belanda maka gerakan bawah tanah tersebut, sangat terbatas pengaruhnya dalam masyarakat. Apalagi dua pentolan PKI itu mempunyai perbedaan-perbedaan prinsip (Muso dan Tan Malaka) mengenai ideologi komunis.

Gerakan-gerakan pada masa pendudukan Jepang masih diteruskan. Kita dapat melihatnya dari kegiatan-kegiatan seperti anti Fasis yang diorganisir dibawah tanah oleh Amir Syarifuddin yang terkenal komprominya dengan Van der Plass.<sup>45</sup> Amir Syarifuddin menerima 25.000 Gulden dari Van der Plass sebagai bantuan untuk penggerakan PKI bawah tanah menghadapi penguasa Jepang di Indonesia.

Walaupun cukup tersembunyi pergerakannya, namun Jepang dapat mengetahui juga gerakan PKI bawah tanah ini. Akibatnya pada tahun 1943 Muso menyingkir kembali keluar negeri, tak lama sesudah mengorganisir PKI ilegalnya. Ia

---

<sup>44</sup> Sanit, *Badai Revolusi*...., 54.

<sup>45</sup> Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi*...., 20.

baru kembali pada tanggal 11 Agustus 1948 setelah keseluruhannya bermukim di Rusia selama 20 tahun.<sup>46</sup>

## B. Pasca Kemerdekaan

Muso kembali dengan tujuan seperti sebelum pelariannya yang pertama. Bedanya ia kembali dengan konsep. Taktik perjuangan serta harapan lebih kongkret dan terperinci berkat pelajaran dan pengalaman yang diperoleh dalam pelariannya di Rusia dan negara-negara Komunis lainnya. Rupanya ia telah ditentukan menjadi seorang pemimpin dalam peristiwa Madiun. Sebab sesampainya di Indonesia, segera ia melihat kelaamanan-kelemahan partai saat itu.

Partai begitu terpecah-pecah atas group-group yang berlainan dasar dan pandangan. Ini tidak memungkinkan partai menjadi organisasi yang akan membimbing partai dan organisasi-organisasi lainnya menuju masyarakat komunis dengan sistem Sovietnya.

Pada 21 Oktober 1945 Mohammad Jusuf meresmikan kembali PKI sebagai partai yang bergerak secara legal, dengan menggabung PKI bentukan Subardjo dan PKI bentukan Muso.<sup>47</sup>

Rencana Muso mengenai taktik untuk menggulung segala kekuatan yang ada dituliskan sebagai berikut :

“Untuk menentukan peranan Komunisme dalam National Front, maka secepat mungkin ketiga partai yang benar-benar berpedoman kepada Marxisme-Leninisme yang kini tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR, yaitu

---

<sup>46</sup> Sanit, *Badai Revolusi*...., 54.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 19.

Partai Komunis, Partai Sosialis dan Partai Buruh) dijadikan partai tunggal yaitu partai kelas pekerja,... dan supaya tentara bebas dari pengaruh kaum kontra revolusioner...<sup>48</sup>

Segala rencana direalisasikannya dan Muso mencapai hasil antara lain karena Setiadjud pada tanggal 27 Agustus 1948 menggabungkan Partai Buruhnya dan tanggal 30 Agustus 1948 menggabungkan Partai Sosialisnya.

Dengan demikian ia telah menampilkan dirinya sebagai penyatu kekuatan-kekuatan komunisme dan pada tanggal 1 September tahun itu juga, ia terpilih menjadi ketua partai.

Inti partai telah bersatu, kini tibalah giliran organisasi-organisasi massa yang menganut ajaran Marxis-Leninisme. Kampanye dan pendekatan dijalankan dengan giat. Hasilnya pada bulan itu juga "Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) menyatakan dirinya berdiri dibarisan

Muso.<sup>49</sup>

Strategi PKI dibawah Muso ialah berusaha menetralsisir partai-partai yang tidak mau diajak bekerjasama. Memperbaiki pelbagai organisasi yang ada, mempengaruhi dan kemudian mendominasi BTI, PESINDO yang didirikan Yamin, GERINDO, Pemuda Indonesia, SOBSI. Front Demokrasi Rakyat dibentuk PKI di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1948, merupakan gabungan organisasi-organisasi dibawah pengaruhnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>49</sup> *Ibid.*



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penting pula disebutkan yakni usaha PKI mempengaruhi aparat pemerintahan desa dengan mengusahakan masuknya kader-kader kedalamnya. Atau mempengaruhi para pamong desa melalui rapat-rapat, diskusi-diskusi, penerangan-penerangan serta tulisan-tulisan yang bersifat propaganda.

Pemimpin-pemimpin PKI menganggap persiapan sudah cukup matang dan saat yang menentukan sudah tiba. Maka pada malam tanggal 18 September 1948 pemberontakan yang sudah direncanakan meletus<sup>50</sup> di Madiun. Namun, kup yang kedua dari gerakan PKI ini pun gagal lagi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>50</sup> Kahin, *Nasionalisme Dan Revolusi.....*, 286.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **BAB III**

## **KONDISI SOSIAL POLITIK PKI DI SURABAYA 1951 – 1965**

### **DAN**

## **STRUKTUR ORGANISASI POLITIK CC PKI**



### **A. Gambaran Umum Kekuatan PKI di Surabaya**

Pemberontakan PKI Madiun disusul dengan Aksi Militer II Belanda yang dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948. Dengan demikian, pemerintah belum sempat menyelesaikan masalah pemberontakan PKI secara tuntas, karena pada waktu hampir bersamaan harus bertempur melawan agresi Belanda tersebut. Banyak tokoh-tokoh atau kader PKI yang berhasil bersembunyi menyelamatkan diri (terutama didaerah pendudukan Belanda).

Sesudah pengakuan kedaulatan dan memasuki tahun 1950-an atau masa demokrasi liberal, tokoh-tokoh komunis muncul kembali memimpin partai secara legal. Selama Aksi Militer II Belanda sampai saat pengakuan kedaulatan, PKI dipimpin oleh Central Comite sementara.

Pada bulan Juli 1950 D.N. Aidit kembali setelah melarikan diri dan berkelana satu setengah tahun diluar negeri (di Vietnam dan Cina). Setelah ia kembali dalam waktu satu setengah tahun, Aidit berhasil memegang kekuasaan partai.

Pada tanggal 7 Januari 1951, Central Comite memilih Politbiro baru dengan lima orang anggota, yaitu Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman dan Alimin. Kecuali Alimin, semua anggota Politbiro tersebut semuanya tokoh-tokoh muda PKI yang

kemudian memimpin partai itu selama 14 tahun, yaitu hingga kehancurannya sesudah pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965.

Pada awal tahun 1950-an garis Komunis Internasional mengalami perubahan. Pada tahun 1952 Stalin mengumumkan garis politik baru yang dikenal dengan “koeksistensi damai Stalin” atau garis lunak. Perubahan garis keras (garis Zhdanov) ke garis lunak ini setelah melihat kegagalan-kegagalan garis keras yang pernah ditempuh. Dalam hal ini negara-negara Eropa Barat ternyata semakin menunjukkan kerja sama politik dan militer. Partai-partai komunis telah gagal meruntuhkan pemerintahan dinegara-negara Eropa Barat dan mereka telah kehilangan prestise, keanggotaan dan dukungan.

Di Asia, terkecuali untuk Vietnam, taktik-taktik kekerasan kaum komunis telah gagal.<sup>51</sup> Pemberontakan-pemberontakan di Indonesia, Filipina, Burma, dan Malaya menemui kegagalan bahkan menemui kehancuran ; di India perang gerilya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id secara terbatas ditindas dan berakibat melemahkan para pengikut partai. Kegagalan strategi komunis tersebut secara diam-diam diakui dalam Kongres ke IX partai Komunis Uni Sovyet. Karena itulah kaum komunis digariskan menempuh “front persatuan” untuk diarahkan kepada kekuatan Amerika Serikat didaratan Eropa. Dalam hubungan ini Eropa merupakan sasaran utama bagi diplomasi Uni Sovyet.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Soetopo Soetanto, “PKI dan Gerakan Komunis....” dalam Alex Dinut *Kewaspadaan Nasional...*, 188.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Kebijakan Stalin ini ditempuh juga oleh Aidit, yang tampaknya memang cocok bagi keadaan partai yang baru mengadakan konsolidasi. Aidit telah menganalisa kemudian mengambil kesimpulan :

- Bahwa strategi yang disusun harus strategi jangka panjang karena kekuatan politik lain tidak akan memberikan tempat kepada PKI dalam pemerintah seperti dalam masa sebelum pemberontakan Madiun.
- Bahwa PKI harus meluaskan massanya dengan jelas, membentuk organisasi-organisasi massa yang meliputi kaum buruh, tani, seniman, pemuda, mahasiswa, wanita, veteran, dan lain-lain.
- Bahwa PKI perlu menunjukkan toleransi dan kerja sama dengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak anti komunis.<sup>53</sup>

29 September 1955, pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar). Tidak kurang dari 80 partai, organisasi masyarakat dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri.

Dalam Pemilu pertama sejak Indonesia merdeka ini, anggota TNI juga menggunakan hak pilihnya berdasarkan peraturan yang berlaku ketika itu.

Dalam pelaksanaannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 Kabupaten, 2.139 Kecamatan dan 43.429 desa. DPR hasil Pemilu, beranggotakan 272 orang yaitu dengan perhitungan bahwa satu orang anggota DPR

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

mewakili 300.000 orang penduduk. Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.<sup>54</sup>

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan dari penelitian ini, maka perlu di paparkan secara umum kekuatan politik PKI di kota Surabaya dan kota-kota lain disekitarnya sebagai bahan perbandingan, pada kurun waktu dalam penelitian ini, yakni dalam tahun 1951 sampai 1966 berdasarkan hasil Pemilu 1955, yaitu ;

Daerah	Masy, NU, PSII		PKI		PNI		Lain-Lain	
	Pemilih	%	Pemilih	%	Pemilih	%	Pemilih	%
Kota Surabaya	72.386		129.449		46.282		61.202	
Kab. Surabaya	182.061		94.396		28.103		15.691	
Kab. Sidoarjo	129.484		53.577		46.868		17.228	
Kab. Mojokerto	100.348		40.745		78.412		34.011	
Kab. Jombang	156.769		47.685		98.035		35.643	
Kresid. Surabaya	640.048	6.482	365.852	3.705	297.699	3.015	148.416	1.502

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa PKI Surabaya secara mengejutkan mampu mengungguli PNI yang waktu itu perolehan suaranya teratas ditingkat nasional. Suara PKI Surabaya tersebut berarti 3,7 % dari seluruh pemilih Surabaya yang berjumlah 30.9319 penduduk. Jumlah ini jelas mengungguli PNI dan sedikit lebih kecil daripada gabungan partai-partai Islam.

Sehingga kedudukan DPR Daerah Tingkat I Jawa Timur dan DPR Daerah Tingkat II Surabaya harus merupakan komposisi dari perolehan suara Pemilu 1955 tersebut. Apalagi setelah Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit 5 Juli 1959, PKI berusaha mendapatkan posisi strategis dalam percaturan politik nasional dengan

<sup>54</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1955 – 1965* (1997), 19.

memberikan dukungan tanpa reserve terhadap berbagai kebijakan Presiden Sukarno, mulai Dekrit, Manipol-Usdek, landreform dan politik berporos Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Dengan dilaksanakannya politik Nasakom, kehadiran PKI dalam kepemimpinan politik nasional pun mendapat legalitas.

### **B. Kelas Sosial Masyarakat Dalam Perspektif PKI Dan Sasaran Politiknya di Surabaya**

Menurut Marx, dalam masyarakat modern (kapitalis) terdapat dua kelas yang saling bertentangan dan tidak mungkin didamaikan. Kelas itu adalah kelas tenaga-tenaga produksi (kaum buruh) dan kelas yang mempunyai alat-alat produksi (kaum kapitalis). Dalam teori ekonomi politik, Marx menamakan hubungan antara tenaga-tenaga produksi dan pemilik alat produksi merupakan hubungan produksi (ekonomi).<sup>55</sup>

Masyarakat kapitalis tersebut dalam pandangan Marx, harus diganti dengan sistem masyarakat yang lebih maju, masyarakat sosialis, yang kemudian mencapai masyarakat termaju, masyarakat komunis.

Menurut Marx lebih lanjut, sistem masyarakat kapitalis tersebut, didalamnya terdapat pengisapan atas manusia oleh manusia. Dalam proses perkembangan masyarakat manusia menuju terbentuknya masyarakat tanpa pengisapan atas manusia oleh manusia, yaitu masyarakat komunis, adalah merupakan hukum perkembangan masyarakat yang obyektif dan riil sifatnya. Oleh karenanya, kelas buruh yang

---

<sup>55</sup> Syahrir Syamsu, "Kegagalan Solidaritas Kelas PKI di Pedesaan Jawa", dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional...*, 330.

tertindas dengan membebaskan diri dari kaum penindas, akan menamatkan segala bentuk pengisapan. Untuk membebaskan diri dari bentuk pengisapan itu, kaum buruh menurut Marx, harus melaksanakan revolusi terhadap kaum pengisap.

Dalam menganalisis teori Marx ini, Lenin lebih mempertajam lagi substansi revolusinya. Menurut Lenin, perjuangan buruh bisa lebih cepat tercapai apabila dipadukan dengan perjuangan petani yang juga mengalami pengisapan oleh kaum feodal. Akan tetapi kelas buruh dan petani ini masih lemah daya intelektualnya. Oleh karena itu, untuk mencapai kebebasan dari kaum pengisap, kaum buruh dan petani harus dipimpin oleh golongan intelektual yang terorganisir, yang mempunyai tingkat disiplin tinggi serta berjiwa revolusioner, yaitu partai komunis.<sup>56</sup>

Dengan teorinya tersebut maka terciptalah oleh pengikut-pengikutnya sebuah teori yang dinamakan Marxisme-Leninisme. Dalam menerapkan teori kelas dari Marxisme-Leninisme di Indonesia itulah, Aidit menyesuaikannya dengan keadaan struktur budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Aidit menguraikan tentang karakteristik masyarakat Indonesia dengan judul tulisannya "Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia". Aidit membagi tingkat perkembangan masyarakat Indonesia kedalam lima tingkatan, yaitu :

1. Masyarakat komune primitif dengan ciri-ciri dimana masyarakat hidup berkelompok-kelompok, bercocok tanam, berburu, alat-alat produksi adalah milik bersama, tidak ada pengisapan atas manusia oleh manusia dan tidak ada negara. Jadi, pada waktu itu menurut Aidit, masyarakat Indonesia adalah

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

masyarakat yang bersifat komune primitif dimana tidak ada kelas-kelas dalam masyarakat.

2. Masyarakat perbudakan dengan ciri-ciri dimana masyarakat telah mengenal sistem perbudakan yang terdiri atas tuan-tuan budak dan orang-orang taklukan untuk dijadikan budak. Disini masyarakat telah mulai mengenal sistem pemilikan alat-alat produksi dan telah pula mulai adanya masyarakat yang berkelas-kelas, dan pada waktu itu pulalah mulai adanya pertentangan kelas dalam masyarakat serta negara sebagai alat penindas.
3. Masyarakat feodal dengan ciri-ciri dimana sebagian besar hasil petani diambil oleh golongan feodal. Dalam masyarakat feodal ini terjadilah pertentangan-pertentangan yang tajam antara kelas tuan tanah dan kelas tani sebagai akibat dari perampasan sebagian besar hasil petani oleh kelas tuan tanah. Negara pada waktu itu sebagai alat penindas kelas tani oleh kelas tuan tanah.
4. Masyarakat kolonial dengan ciri-ciri dimana kaum petani menderita dua macam penindasan, yaitu dari raja-raja setempat dan pihak kolonial Belanda dengan organisasi dagangnya VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). Keadaan ini memuncak pada masa Cultuurstelsel, dimana disamping kaum petani dipaksa menanam tanaman untuk kepentingan kaum kolonial juga dipaksa membayar upeti kepada golongan feodal. Selanjutnya Aidit menguraikan,, dengan adanya Rvolusi Industri di Eropa maka berkembanglah imperialisme, dimana negara-negara jajahan dijadikan tempat pelemparan hasil-hasil industri mereka.

5. Masyarakat Indonesia sekarang adalah setengah jajahan dan setengah feodal dengan ciri-ciri belum merdekanya Indonesia dilapangan ekonomi, seperti masih adanya dan diakuinya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan juga masih bercokolnya sisa-sisa feodalisme.

Berdasarkan analisis tersebut, Aidit merumuskan dua hal penting untuk dilaksanakan segera, yaitu : menenyahkan imperialisme dan basis sosial yang mendukung kekuatan imperialisme, yakni kelas tuan tanah.

Dari hasil penelitian Aidit tentang masyarakat Indonesia, ternyata daerah yang paling subur untuk merealisasikan ide-idenya adalah daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena memang dikedua daerah ini mayoritas rakyatnya misikin akibat tekanan penduduk.

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH). Kedua undang-undang ini berhasil didramatisir oleh Aidit. Setiap golongan yang menentang undang-undang ini dicap kontra-revolusioner, diteror dan bahkan dibunuh.<sup>57</sup>

PKI dengan Barisan Taninya (BTI) mulai menjalankan aksi-aksi sepihak dengan jalan menyabot tanah milik rakyat yang anti komunis, pengrusakan sawah milik rakyat yang non komunis, pengrusakan hutan lindung milik pemerintah, mengadakan taktik perang urat syaraf untuk menegangkan situasi dan seterusnya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 33

<sup>58</sup> Sartono Kartodirdjo, *Keresahan Pedesaan pada Tahun 1960-an : Khususnya tentang kasus di Klaten, Banyuwangi dan Bali* (Jakarta : Djambatan, 1980), 340 – 342.

Dari sudut pandang dialektika-materialisme tersebut, masyarakat terbentuk menjadi dua kelas, yaitu kelas revolusioner dan kelas reaksioner. Kelas reaksioner terdiri atas tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis birokrat, dan lainnya ; sedangkan kelas revolusioner adalah guru desa yang merupakan intelektual desa, tukang-tukang kerajinan tangan serta tukang lainnya, pedagang kecil, pekerja hutan, buruh perkebunan dan buruh industri.<sup>59</sup>

Disamping gambaran tentang pengumpulan kelas-kelas, PKI juga mengelompokkan adanya berbagai kelas dalam masyarakat Indonesia sebagai bagian dari penjabaran dua kelas (revolusioner dan reaksioner) sebelumnya. Kelas-kelas tersebut dibagi dalam beberapa kelompok.<sup>60</sup>

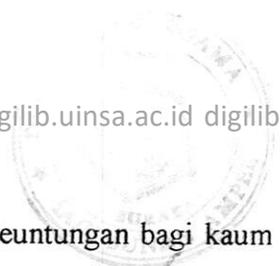
Pertama, kelas tuan tanah. Golongan ini menguasai tanah yang luas dan meliputi beberapa puluh malah ratusan hektar. Golongan ini disebut tuan tanah besar. Di bawahnya terdapat tuan tanah kecil dengan memiliki tanah tiga sampai lima hektar, namun menghasilkan padi yang cukup banyak karena dikerjakan dengan intensif. Kelas ini dilihat sebagai kelas penghambat bagi penyelesaian “revolusi”. Dan sesuai dengan pandangan bahwa kepemilikan pribadi menjadi dasar kerusakan ekonomi (adanya alienasi ekonomi) maka kelas tuan tanah harus disingkirkan dan dikategorikan sebagai “sasaran revolusi”.

Kedua, kelas borjuasi yang terbagi dua, yaitu borjuasi besar yang bersifat komprador dan borjuasi nasional. Borjuasi besar yang komprador melakukan kerja

---

<sup>59</sup> Zulfikar Ghazali, “Strategi dan Taktik Perjuangan PKI” dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional...*, 39.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 40.



sama dengan imperialis asing untuk mendatangkan keuntungan bagi kaum tersebut. Kelas ini berkembang sebagai akibat penguasaan sistem ekonomi pada masa kolonial yang lebih mengutamakan kelompok tertentu (golongan Cina) dalam masyarakat. Sedangkan borjuasi nasional adalah kategori untuk kekuatan tengah, yaitu seluruh kekuatan sosial politik yang dapat diajak bekerja sama.

Ketiga, kaum tani. Kaum tani mengisi hampir seluruh masyarakat Indonesia mengingat kondisi yang agraris. Kaum ini terbagi atas kaum tani kaya – sedang dan tani miskin. Keempat, kelas borjuasi kecil diluar kaum tani. Kelas ini terdiri dari kaum intelektual, pemuda/mahasiswa, pedagang kecil, pekerja kerajinan tangan, nelayan, dan kaum pekerja.

Kelima, lintah darat dan tengkulak. Lintah darat bertindak sebagai pembeli tanaman petani selagi muda dan itu pada saat petani sedang membutuhkan uang untuk menyambung hidup atau keperluan lainnya. Keenam, kapitalis birokrat yaitu golongan pamong desa yang mendapat penghasilan dari tanah bengkok, ponigoro, dan sebagainya. Golongan ini menetapkan harga jual bagi hasil petani yang sering pula lebih rendah dari harga sebenarnya. Disamping itu menerima hasil pungutan yang diambil dari setiap petani yang berhubungan dengan kantor lurah. Ini merupakan sumber keuangan pula dari golongan ini.

Ketujuh, kelas proletar. Kelas ini terdiri dari buruh transpor, buruh pabrik, buruh bengkel, buruh tambang, buruh industri kecil dan kerajinan tangan, serta buruh pertanian dan kehutanan.

Kesemua golongan ini merupakan kekuatan utama penggerak revolusi Indonesia. Kelas ini mempunyai kesadaran yang tinggi tentang cita-cita, tujuan dan cara mencapai revolusi Indonesia. Kekejaman kaum imperialis telah menumbuhkan kesadaran kelas bagi buruh dan ini menjadi tanah subur bagi penyemaian ide-ide Marxisme-Leninisme. PKI Melihat kelas ini yang paling tepat memimpin revolusi Indonesia.

Kedelapan, kaum gelandangan. Kaum ini tumbuh dan berkembang disebabkan oleh pengangguran akibat kemajuan imperialisme. Lapisan ini perlu dibina mengingat wataknya yang goyang akibat sifat destruktifnya. Dalam golongan ini dimasukkan juga pencuri, perampok, pengemis, pelacur, dan sebagainya.

Dari kedelapan golongan ini, kelompok pertama, tuan tanah, merupakan sasaran bagi pelaksanaan landreform di Surabaya. Sedangkan kelompok ketujuh dan kedelapan merupakan kelompok massa yang harus dikuasai dan digerakkan. Kelompok lainnya relatif komunitas desa atau sasaran agitasi PKI di daerah pedesaan Jawa Timur.

Untuk memberi gambaran sejauh mana PKI dan segenap organisasi mantelnya mendominasi rakyat Jawa Timur, maka dibawah ini jumlah kelompok sosial berdasarkan luas pemilikan tanah di Jawa Timur dan sekitarnya :<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah : Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960 – 1969* (Yogyakarta : Jendela, 2001), 170 .

No	Luas Pemilikan Tanah (hektar)	Jumlah Pemilik Tanah	Kategori
1	20,01 – keatas	93	Tuan tanah
2	10,01 – 20,00	577	Tuan tanah
3	5,01 – 10,00	4.369	Tani kaya
4	2,01 – 5,00	40.954	Tani sedang
5	1,01 – 2,00	167.565	Tani sedang
6	0,60 – 1,00	464.532	Tani sedang
7	0,00 – 0,50	933.615	Tani miskin
	Jumlah	1.611.655	

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat pedesaan yang hidup dari sektor pertanian (tradisional) dengan sawah sebagai faktor produksi utama. Jadi tidak mustahil apabila faktor pemilikan tanah merupakan salah satu penyebab utama bagi terjadinya stratifikasi sosial digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dimasyarakat pedesaan Jawa Timur.

Meskipun belum dapat dipastikan adanya hubungan antara jumlah petani penyerobot serta luas tanah yang diserobotnya dengan jalan landreform (pembebasan tanah). Namun demikian kasus-kasus penggarapan secara liar itu terjadi bertepatan tatkala PKI menggalakkan “program 1001”. Dengan program itu PKI/BTI menggerakkan massa pengikut untuk menanami tanah-tanah kosong tanpa memedulikan siapa pemiliknya, sebagaimana yang terjadi di Surabaya dan akan diungkapkan dibagian berikutnya.

Tidak mustahil kasus-kasus pemogokan buruh disektor pertanian yang sangat meluas serta menempati urutan tertinggi dari pemogokan-pemogokan diberbagai sektor di Jawa Timur (Surabaya) pada tahun 1963, ada kaitannya dengan sistem pertanian bagi hasil dan aksi-aksi sepihak yang dilancarkan buruh tani dari lingkungan PKI/BTI. Yang aneh pemogokan-pemogokan itu justru memuncak pada tahun 1963 ketika persengketaan-persengketaan pelaksanaan UUPBH dan UUPA memanas. Pada tahun 1964, 1965, dan 1966 kekacauan menurun secara drastis seperti tergambar pada tabel dibawah ini.<sup>62</sup>

#### Banyaknya perselisihan dan buruh yang mogok menurut industri

Jenis Industri	1963		1964		1965		1966	
	A	B	A	B	A	B	A	B
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pertanian	327	19.2	112	16.5	101	-	26	-
Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Perindustrian	308	4.4	222	0.3	180	0.4	1	-
Bangunan	11	0.1	15	0.7	15	-	-	-
Listrik, gas, air dan sanitasi	2	-	5	-	1	-	-	-
Pengangkutan, penyebrangan, dan perhubungan	65	1.0	31	0.1	-	-	-	-
Perdagangan	58	0.3	34	8.0	-	-	-	-
Jasa / service	38	0.1	19	0.0	1	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>809</b>	<b>25,1</b>	<b>449</b>	<b>15,6</b>	<b>298</b>	<b>0,5</b>	<b>27</b>	<b>-</b>

Statistik Indonesia Tahun 1964 - 1967, BPS Jakarta, hal. 41 - 43.

Keterangan : A = khusus

B = buruh yang mogok ( x 1000)

Buruh dan tenaga kerja lain seperti tercantum dalam tabel diatas (misal, perindustrian, bangunan, listrik, gas, air dan sanitasi, pengangkutan, penyebrangan, dan perhubungan, serta jasa), dapat berpusat di Surabaya. Sebagai ibukota Jawa Timur, Surabaya juga merupakan kota pelabuhan dan perdagangan yang sejak abad

<sup>62</sup> *Ibid*, 174.

ke XIX mempunyai jaringan industri yang maju.<sup>63</sup> Sehingga menjadi sasaran utama bagi agen propaganda PKI.

Atas dasar itulah, PKI kemudian membangun basis massanya di Jawa Timur sebagai benteng untuk penyebaran ideologi komunis yang potensial. Didesa-desa Jawa Timur PKI melakukan propaganda terhadap petani sedang di Surabaya PKI mengagitasi buruh untuk melakukan berbagai aksi sepihak.

### C. Visi dan Misi PKI

Azas, tujuan, usaha, dan program kerja PKI jelas terdapat dalam anggaran dasarnya, yaitu :

- Dengan berazaskan Marxisme-Leninisme PKI bertujuan terbentuknya masyarakat sosialis di Indonesia, yaitu susunan masyarakat Indonesia, di mana semua alat-alat produksi dimiliki oleh dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
- PKI berusaha mencapai tujuannya dengan jalan perjuangan kelas yang revolusioner, yaitu perjuangan kelas buruh, tani dan golongan-golongan yang terhisap serta tertindas terhadap kelas borjuis.

Garis besar program partai antara lain :

- Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah bentuk organisasi yang tertinggi dari barisan kelas buruh yang berorganisasi dan yang progresif.

---

<sup>63</sup> M.R. Fernando, "Pertumbuhan Kegiatan Ekonomi Nonpertanian Pribumi di Jawa, 1820-1880", dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia : Berbagai Tantangan Baru* (Jakarta : LP3ES, 2000), 342.



- Partai Komunis Indonesia mewakili kepentingan nasion dan rakyat Indonesia umumnya. Perjuangan pada tingkat sekarang ialah perjuangan untuk mencapai Republik Demokrasi Rakyat Indonesia dan akhir tujuannya ialah mencapai masyarakat Komunis Indonesia.
- Partai Komunis Indonesia mempergunakan teori Marxisme-Leninisme yang konsekuen dipraktekkan di Indonesia sebagai pedoman dalam segala lapangan pekerjaan guna menentang tendens-tendens dogmatisme dan oportuniste.
- Partai Komunis Indonesia mempergunakan dialektika-materialisme dan historika-materialisme sebagai dasar guna menerima dengan kritis warisan sejarah Indonesia maupun sejarah dunia untuk menentang segala pandangan dunia ideolisme dan mekanik-materialisme.
- Partai Komunis Indonesia harus bertindak tak kenal kompromi dan harus bertindak keras terhadap golongan oportunist, kompromis, avonturir dan anarsis dalam partai. Anggota yang tak mau mengakui kesalahannya harus dipecat supaya partai menjadi kuat.
- Partai Komunis Indonesia tidak boleh segan-segan membuka dan mengakui kesalahan atau kekurangannya. Partai Komunis Indonesia harus mempergunakan kritik dan oto-kritik tentang kesalahan dan kekurangannya untuk mendidik anggota partai dan kader-kadernya, dan dalam tempo secepat-cepatnya memperbaiki kesalahan dan kekurangan itu. Partai Komunis Indonesia menentang sikap atau perasaan yang congkak, yang takut mengakui kesalahan-kesalahan sendiri dan yang takut kritik dan otokritik.

Partai Komunis Indonesia harus mencurahkan segenap tenaga untuk bekerja dikalangan rakyat Indonesia umumnya, harus menghubungkan diri secara erat dan luas dengan massa buruh, tani serta golongan rakyat lain yang revolusioner harus benar-benar memelihara luas dan stabilnya hubungan ini. Setiap anggota partai harus mengerti bahwa kepentingan partai berarti kepentingan rakyat, tanggung jawab kepada partai dan kepada rakyatpun sama juga. Setiap anggota partai harus memperhatikan dengan teliti suara dari rakyat serta mengerti betul-betul kebutuhan mereka, kemudian membantu mereka berorganisasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Setiap anggota partai harus tetap belajar dari rakyat dan bersikap tak kenal lelah mendidik rakyat serta memupuk dan mempertinggi kesadarannya.

- Partai Komunis Indonesia harus yakin bahwa memisahkan diri dari rakyat berarti bahaya. Partai Komunis Indonesia harus mengawasi, mencegah dan memberantas adanya elemen-elemen membuntut, main perintah, mengisolasi, mengintrig, birokrasi, bapakisme, konco-sistem, militerisme dan lain-lain yang bertendens memisahkan diri dari rakyat.<sup>64</sup>

Jadi jelaslah PKI dengan antusiasme tinggi telah mempersiapkan gerakan revolusi berdarahnya di Indonesia. Maka dalam tahap awal ini, Aidit mencoba membangun akar-akar komunisme dengan menguasai desa terlebih dahulu yakni dengan semboyan “desa mengepung kota”. Setelah desa bisa dijadikan pangkalan

---

<sup>64</sup> Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional...*, xiii – xv.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bagi berkembangnya organisasi maka perlahan-lahan kota dengan sendirinya akan lebih mudah dikuasai.

#### **D. Struktur Organisasi Politik CC PKI**

Pedesaan menjadi tujuan pertama PKI dalam tahap ini sebagai kekuatan dan alat untuk mencapai program. PKI menyadari pentingnya organisasi dalam memodernkan partainya. Yang menjalankan roda partai sehari-hari ialah Komite Central. Anggotanya adalah pejabat-pejabat penting partai, pemimpin-pemimpin Departemen dari CC. Politbiro adalah penentu garis kebijaksanaan politik partai dan langsung bertanggung jawab kepada ketua CC, yakni Aidit. Untuk tugas-tugas khusus yang juga penuh rahasia dibentuklah Biro Khusus yang bertanggung jawab kepada ketua partai. Tugas Biro Khusus antara lain, membina pejabat-pejabat penting pemerintah, anggota-anggota organisasi atau anggota-anggota partai non komunis, warga angkatan bersenjata yang dianggap mau bekerja sama dengan PKI dan bertindak sebagai badan intelijen. Biro khusus secara resmi dibentuk dalam tahun 1964 dengan ketua pertamanya Syam dan anggota Pono, Njono.

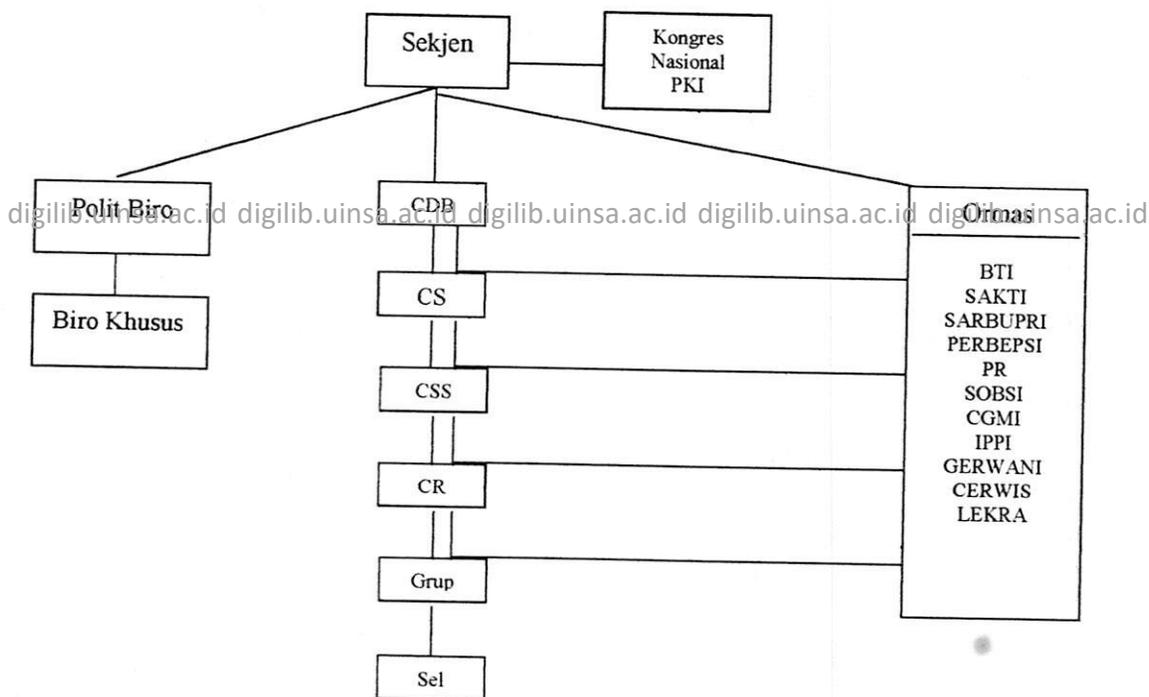
Menurut regional, organisasi dibawah CC adalah Komite Daerah Besar (CDB), Komite Pulau Besar (CPB), Komite Jakarta Raya (CDR), ketiganya setingkat. Di Indonesia kira-kira ada 21 organisasi tingkat kedua ini. Kemudian menyusul Komite Seksi (CS) yang meliputi daerah Kabupaten dan Kota Besar. Komite Sub Seksi (CSS) melingkupi kecamatan atau kota kecil. Daerah yang terendah ialah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Comite Ranting (CR) yang meliputi daerah suatu desa atau bagian kota, suatu pabrik, kampung, kantor, sekolah, dengan sedikitnya 100 orang anggota.

Kalau dilihat dari jumlah anggota PKI yaitu lainnya yang menjadi sokoguru organisasi PKI yaitu Grup yang terdiri dari kira-kira 10 orang dan Sel yang terdiri dari paling banyak 5 orang.<sup>65</sup>

Menurut Sartono Kartodirdjo, Sejarah politik baru haruslah terdiri dari beberapa unsur dan kerangka konseptual, yakni antara lain, struktur kekuasaan, tipe elite, kategori otoritas, kebudayaan politik, kepemimpinan, proses mobilisasi, dan lain sebagainya.<sup>66</sup> Berikut ini merupakan struktur organisasi PKI sebagai bagian dari fokus kajian tulisan ini.



<sup>65</sup> Sanit, *Badai Revolusi*..... 74 – 75.

<sup>66</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta : Gramedia, 1993), 166.

Secara organisatoris Surabaya termasuk bagian dari Komite Seksi yang langsung dibawah Komite Daerah Besar (CDB) yang dalam hal ini adalah Jawa Timur.

#### **D. Strategi PKI Dalam Mobilisasi Massa**

Dalam sejarah perkembangannya paham komunis sebagai ideologi dikenal adanya tiga tipe atau tiga pola, yaitu :<sup>67</sup>

##### **1. Tipe Uni Soviet**

Pada tipe ini pengembangan paham komunis didasarkan pada doktrin perang permanent (permanent warfare) dengan mengandalkan kekuatan kaum komunis dari luar negeri sebagai kekuatan pokok dan kekuatan dalam negeri sebagai penunjang, khususnya kaum buruh dan kaum cendekiawan yang sudah dibina. Contohnya, aksi Uni Sovyet di Hongaria, Polandia dan Afghanistan.

##### **2. Tipe Republik Rakyat Cina**

Pengembangan komunisme dilakukan melalui doktrin revolusi permanen (permanent revolution) dengan mengandalkan kekuatan dalam negeri sendiri sebagai kekuatan pokok, khususnya petani dibantu oleh dukungan etnis Cina perantauan dan kelompok mahasiswa miskin.

---

<sup>67</sup> Saafroedin Bahar, "Bahaya Laten Komunis dan Ekstremmitas Lainnya", dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional...*, 380 – 383.

### 3. Tipe Eropa Barat

Pengembangan komunisme dilakukan melalui peluang yang terbuka oleh kultur politik Eropa Barat yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada perseorangan, sehingga mengandalkan kekuatan dalam negeri sebagai kekuatan pokok, khususnya kaum cendekiawan.

Sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, strategi komunis mengenal tiga macam kategori gerakan, yaitu : *gerakan dinegara komunis* ; *gerakan dinegara non komunis* yang tidak melarang adanya partai komunis ; serta *gerakan dinegara non komunis* yang melarang adanya partai komunis.

Kasus gerakan komunisme yang terjadi di Indonesia pada periode 1960 – 1966 mengikuti tipe yang kedua, yakni tipe Republik Rakyat Komunis dan termasuk gerakan yang terlarang karena Indonesia berfalsafah Pancasila.

Selepas pemberontakan Madiun 1948, kebangkitan PKI ditandai dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pertemuan Komite Central (CC) PKI diawal Januari 1951. pimpinan PKI antara tahun 1948 – 1951 seperti Tan Ling Djie dan Alimin digantikan oleh D.N. Aidit, MH Lukman dan Njoto. Para pengganti ini merupakan angkatan muda dalam tubuh CC PKI ketika itu.

Setelah berhasil menguasai Central Komite PKI, maka Aidit mencanangkan suatu program baru sebagai ganti program “Jalan Baru Untuk Republik Indonesia” yang pernah diajukan Muso. Strategi baru yang diajukan Aidit dengan nama “Jalan Baru” mengisyaratkan bahwa PKI menempuh/menjalankan strategi kanan, yang

berarti melaksanakan jalan damai dan perundingan melalui usaha mngkompromikan masalah didalam badan perwakilan.<sup>68</sup>

Tidak lama strategi ini dicanangkan, pada bulan Agustus 1951 pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Perdana Menteri Sukiman, 1951 – 1952(Masyumi) mengadakan penangkapan-penangkapan dan penggeledahan terhadap seluruh kantor-kantor PKI dan organisasi dibawahnya.<sup>69</sup> Hal dilakukan karena keterlibatan beberapa pimpinan SOBSI/PKI dalam kerusuhan-kerusuhan di beberapa tempat, terutama di kota-kota pelabuhan (termasuk Surabaya).

Sangat disayangkan bahwa usaha mengadakan pembersihan ini mengalami hambatan karena pemerintah yang berkuasa (PM. Sukiman) diganti oleh sebab masalah Mutual Security Act (suatu perjanjian yang memberikan arti keterikatan pada salah satu kekuatan besar, hal mana bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif).

Dalam masa kabinet Wilopo (April 1952 – Juli 1953) yang bersikap lunak, PKI kembali berkembang (ironinya kabinet Wilopo ini dijatuhkan akibat peristiwa Tanjung Morawa, yang digerakkan PKI, dalam masalah pemakaian tanah negara).

Sekembalinya dari Moskow dan RRC (Republik Rakyat Cina) pada tahun 1953, Aidit melontarkan konsep yang dikenal dengan “Jalan ke Demokrasi Rakyat Bagi Indonesia”. Dengan konsep itu Aidit berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan pendahulunya yang hanya menggunakan cara-cara revolusioner untuk

<sup>68</sup> Zulfikar Ghazali, “Pola Kepemimpinan...”, dalam Ale Dinuth, *Kewaspadaan Nasional...*, 162.

<sup>69</sup> *Ibid.*

mencapai tujuan perjuangan. Dalam konsepnya Aidit menerangkan pula gagasan serta programnya untuk membentuk persekutuan buruh dan tani lewat Front Persatuan Nasional.

Ia juga menegaskan perlunya revolusi agraria sebagai syarat pembangunan ekonomi Indonesia dan dalam hal ini diketengahkan golongan mana yang menjadi lawan atau kawan.<sup>70</sup>

Setelah itu Aidit menyusun suatu uraian yang kemudian menjadi dasar, landasan dan penyemaian strategi PKI untuk menguasai seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Program yang diusulkan Aidit itu disahkan dalam Kongres Nasional V PKI (Maret 1954). Dan setelah diadakan perbaikan seperlunya, disosialisasikanlah program itu setelah Sidang Pleno V CC PKI bulan Juli 1957. dalam program tersebut dikemukakan dasar pandangan, sikap, dan tindakan yang akan dijalankan PKI dalam usahanya menguasai kehidupan politik dan pemerintahan serta ekonomi dan sosial budaya di Indonesia.

PKI mencanangkan mengembangkan ajaran Marxisme-Leninisme melalui kombinasi tiga bentuk perjuangan, yaitu :

1. perjuangan gerilya didesa-desa (terutama dari kaum tani).
2. gerakan revolusioner dikota-kota oleh kaum buruh, terutama buruh transpor.
3. pekerjaan partai dikalangan kekuatan bersenjata.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah....*, 100.

<sup>71</sup> Zulfikar Ghazali, "Strategi dan Taktik Perjuangan PKI" dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional....*, 38.



Rumusan bentuk perjuangan ini berdasarkan pandangan dan pendapat bahwa "revolusi Agustus 1945" belum selesai dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan baru menjadikan Indonesia negara semi feodal dan semi jajahan. Maka PKI lah yang akan menuntaskan revolusi selanjutnya.

Adapun landasan teori yang digunakan para pemimpin PKI dalam menghimpun massa adalah visi ekonomi. Sesuai dengan interpretasi Lenin terhadap Marxisme, posisi petani diletakkan pada kedudukan kaum buruh. Artinya, kaum tani dan buruh harus bersatu dan menggerakkan revolusi komunis di Indonesia dengan kaum buruh sebagai pelopornya.

Strategi diatas mengisyaratkan bahwa PKI menempuh dua jalan untuk mencapai tujuannya. Pertama, menempuh jalan legal, yang merupakan penggabungan antara pokok pertama dengan pokok kedua. Jalan legal ini sering juga disebut dengan jalan damai. Kedua, jalan ilegal, yang merupakan maksud dari pokok ketiga.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk dapat melaksanakan strategi diatas, maka PKI memerlukan suatu corak pemimpin yang dapat bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Untuk itu Aidit dipilih kembali sebagai Sekretaris I CC PKI yang juga merupakan tulang punggung utama partai.

Demikianlah dengan strategi Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan dan dibawah pimpinan Aidit, PKI berhasil masuk kedalam empat besar disamping PNI, Masyumi, dan NU. Hal ini memperkuat kedudukan Aidit sehingga dalam Kongres Nasional PKI VI September 1959, ia terpilih kembali sebagai ketua CC PKI

didampingi MH Lukman, Nyoto dan Sudisman dilingkaran pertama dan Sakirman, Njono, B. Oloan Hutapea dan Peris Pardede, dilingkaran kedua.<sup>72</sup>

### **E. Aksi Sepihak PKI di Surabaya**

Dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan judul “Manipol” (manifesto Politik), Presiden Sukarno mengumumkan berakhirnya hak-hak pemilikan tanah yang didasarkan hukum Barat, diganti dengan hukum nasional. Dalam pidato itu ditegaskan pula *landreform* sebagai bagian mutlak revolusi Indonesia akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, *landreform* dijadikan media bagi BTI/PKI untuk melakukan aksi-aksi penyerobotan diberbagai daerah, seperti di Surabaya ini.

Tujuan pemerintah melaksanakan *landreform* adalah untuk lebih pemeratakan pendapatan semua rakyat tanpa memandang status sosialnya serata menciptakan susunan sosial yang akan membuka jalan bagi peningkatan produksi nasional. *Landreform* merupakan sarana yang tepat guna menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran khususnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup seluruh bangsa.

Program pemerintah tersebut kemudian diberi landasan hukum yang dikenal dengan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria atau Agraria Reform) yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 24 September 1960. PKI sangat menyetujui UUPA ini karena dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan aksi-aksi kaum buruh dan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, 164.

tani guna mengenal musuh-musuhnya. Dengan pelaksanaan UUPA kaum tani miskin akan mendapat sekadar perbaikan nasib meskipun bersifat sementara.

UUPA ini sebenarnya mempunyai lima program yaitu : (1) pembaharuan hukum agraria(2) penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonis atas tanah(3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur(4) perencanaan persediaan dan pengusahaan tanah(5) perencanaan persediaan, peruntukan serta penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya..<sup>73</sup>

Tahun 1960 pemerintah mulai mempersiapkan pelaksanaan UUPA atau landreform. Pasal 7, 10 dan 17 yang melarang kepemilikan tanah lebih dari ketentuan maksimum segera diberlakukan. Kepada pejabat pemerintah diberi wewenang mengambil tanah lebih untuk selanjutnya dibagikan kepada mereka yang berhak. Pemerintah mengharapkan pelaksanaan landreform telah selesai pada 1964.

Pada akhir tahun 1963 PKI melancarkan kampanye "aksi sepihak" guna memberlakukan undang-undang landreform dari tahun 1959 - 1960 yang pelaksanaannya belum terwujud. Maka aksi sepihak pun terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Segera keributan-keributan, pembakaran-pembakaran, penculikan-penculikan, dan pembunuhan-pembunuhan banyak terjadi, yang sebagian berbentuk kekerasan komunal, yaitu benturan kaum abangan pendukung PKI dengan para santri.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah...*, 132.

<sup>74</sup> MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia...*, 416.

Tiga kegiatan yang menandai pelaksanaan landreform dari tahun 1961 sampai 1965 adalah :

1. pendaftaran tanah
2. penentuan tanah lebih serta pembagiannya, kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah
3. pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) atau Undang-Undang No. 2 tahun 1960.

Pada Konferensi Wanita Tani BTI bulan Mei 1964 di Surabaya, Samo'ah wakil dari BTI Jawa Timur mengatakan bahwa suaminya telah terbunuh oleh wakil lurah karena melancarkan aksi sepihak untuk menyukseskan pelaksanaan landreform. Menurut Samo'ah, pembunuhnya hanya dihukum 10 hari. Dalam konferensi itu Samo'ah menegaskan agar kaum tani revolusioner menyukseskan aksi sepihak.

Dan supaya aksi sepihak itu dapat mencapai kemenangan ideologi, politik, dan ekonomi, maka diperlukan empat syarat ; jelas sasaran, jelas cara melakukan aksi, jelas sandaran, dan jelas kapan memulai serta mengakhiri.<sup>75</sup>

Di Kecamatan Tandes Surabaya, BTI berusaha menekan panitia landreform agar segera meredistribusikan tanah lebih kepada para petani penggarap. Musyawarah untuk memecahkan masalah itu telah diselenggarakan pada 7, 16, dan 20 Juni 1964, tetapi belum menghasilkan suatu keputusan. Bahkan tanah bekas milik Imam Hadi dan Djami'an dari Moro Krembangan yang menjadi pokok pembahasan kemudian

---

<sup>75</sup> Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah.....*, 215.

berubah menjadi tanah hibah. Meskipun BTI melakukan protes kepada Tri Tunggal namun para petani penggarap dari anggota BTI gagal menerima redistribusi tanah lebih.

Penyerobotan tanah lainnya di Surabaya, terjadi di dikampung Petemon. Dalam waktu singkat diatas tanah bekas milik Tjan Siong Goh di Petemon telah berdiri ratusan rumah. Dengan dalih rumah-rumah itu telah memenuhi peremajaan kota, BTI setempat menuntut agar walikota Surabaya, Murachman SH (yang juga PKI), segera mengesahkannya sebagai tanah milik. Usaha itu sia-sia karena pemerintah pusat memutuskan memberikan hak pakai bekas tanah milik Tjan Siong Goh itu kepada PT. Bagong Putra.

Menjelang tahun 1964 perang pamflet dan spanduk pun terjadi. Terbukti delegasi PKI Surabaya mendatangi Resort Kepolisian Surabaya untuk meminta perhatian polisi terhadap pamflet dan spanduk yang berisi fitnah atau hasutan kelompok agama yang menyerang PKI. Suasana tegang juga dialami beberapa kampung di Surabaya. Suatu rapat Nasakom disuatu kampung di Surabaya menjadi kacau karena Pemuda Ansor menuduh ucapan-ucapan pembicara dari Pemuda Rakyat bernada anti agama. Ditempat lain, pengajian agama yang diselenggarakan Ikatan Pelajar NU (IPNU) dilempari batu dan diganggu dengan bunyi petasan atau mercon.<sup>76</sup>

Sementara itu dilaporkan juga bahwa beberapa insiden terjadi dikampung-kampung di Surabaya. Satu diantaranya, insiden itu terjadi akibat adanya desas-desus bahwa orang PKI telah membuat 40 pedang untuk menyerang Pemuda Ansor.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, 217.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Suasana Surabaya yang mulai memanas itu makin diperkeruh oleh pernyataan anggota Jaksa Tinggi Jawa Timur yang tampaknya prokomunis, bahwa peristiwa Kanigoro Kediri (13 Januari 1965) melibatkan bekas tokoh partai terlarang Masyumi. Jaksa itu selanjutnya menambahkan bahwa di Banyuwangi telah ada kelompok yang menurunkan gambar Presiden Sukarno. Terjadi pula pengrusakan bendera nasional disuatu kampung di Surabaya.<sup>77</sup>

Menanggapi sikap dan ucapan Pemuda Rakyat yang bersifat anti Islam, Pemuda Ansor Menganti mendukung dan memuji pembubaran rapat umum dikecamatan ini itu. Dilain pihak Pemuda rakyat menuduh bahwa hal itu terjadi karena pancingan dan ulah sabotase “kontrarevolusioner” anti persatuan dengan dengan selimut agama.<sup>78</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



## BAB IV

### ANALISA

#### A. Komunisme vs Agama : Ideologi-Ideologi Perjuangan Kemerdekaan

Dalam konteks pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, menurut Sartono, nama “Indonesia” pada awal-awal abad XX berfungsi sebagai simbol perjuangan nasional, sebagaimana PI (perhimpunan Indonesia), Persatuan Sarekat Islam Indonesia, maupun Partai Komunis Indonesia.<sup>79</sup>

Dari sejak dirikannya PKI pada 1920, pada masa kolonial, PKI telah menunjukkan sikapnya yang revolusioner kepada kemapanan (anti kemapanan). Dalam rangka mencapai masyarakat yang tanpa kelas, PKI menganggap harus melalui jalan revolusi dan sekali-kali revolusi. Sesuai dengan inti materialisme-dialektis, revolusi komunis merupakan keharusan sejarah.

PKI dalam periode kolonial menjelma menjadi ideologi tandingan pemerintah yang ingin segera melakukan perubahan-perubahan mendasar. Dalam usaha perubahan ini, komunis memanfaatkan petani dan buruh. Keberanian mereka menentang penjajahan dibuktikan dengan terjadinya pemberontakan di Banten 1926 dan di Sumatera Barat (Padang) pada 1927, telah memberi semangat revolusioner pula pada organisasi-organisasi lain pada masa awal-awal pergerakan nasional.

---

<sup>79</sup> Sartono Kartodirdjo. *Indonesian .....* 60.

Surabaya sebagai tempat lahirnya PKI pertama kali merupakan duplikat keprogresifan SI dibawah Tjokroaminoto. Jadi, dapat dikatakan bahwa Surabaya merupakan *ibu* bagi organisasi-organisasi progresif revolusioner.

Dipihak lain, SI Surabaya yang lebih dulu mapan, berdiri dengan solid dan massa yang besar dihadapan PKI, dengan tegas menolak penggabungan ideologi Islam dengan komunisme. SI selanjutnya menegakkan disiplin partai, yaitu melarang keanggotaan rangkap PKI dan SI sekaligus pada 1923. SI lah yang menjadi pelopor kesadaran politik umat Islam di Hindia serta secara implisit memberikan doktrin perjuangan kemerdekaan Indonesia bagi umat Islam Surabaya.

Dalam periode awal terbentuknya PKI, Semaoen sudah mempunyai pandangan kedepan bagaimana langkah-langkah PKI dalam menjalankan organisasi. Ia melihat SI yang sedemikian besar tumbuh di Surabaya, kota pelabuhan. Sehingga kemudian ia menggerakkan PKI dari sebuah kota pelabuhan juga, Semarang.

Dapatlah disimpulkan bahwa komunisme pada periode pertama, 1920 – 1927, dianggap Sukarno menjadi tonggak awal dari perjuangan rakyat melawan kolonialisme dan imperialisme asing. Karena sebelumnya tidak ada satu organisasipun yang berani mengangkat senjata melawan Belanda.

Hal ini menimbulkan implikasi-implikasi psyko-politis terhadap jiwa dan orientasi perjuangan kemerdekaan waktu itu, karena pergerakan nasional mulai mendapat arahnya, yakni menentang imperialisme dan kolonialisme hingga Indonesia merdeka.

Disatu pihak, sejarah juga mencatat bahwa kelahiran PKI tidak lepas dari kegiatan-kegiatan reaksioner dari SI (Syarikat Islam) melalui infiltrasi (penyusupan) yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang PKI. Sehingga antara Islam (agama) disatu pihak, dengan Komunis (PKI) dipihak lain sama-sama mempunyai pandangan yang revolusioner dengan pengejawantahan yang berbeda, nilai dan oerientasi yang berbeda pula.

Karenanya, Sukarno pada 1959, memasukkan komunis sebagai salah satu aliran-aliran dalam membangun bangsa yang baru merdeka. Meskipun pihak-pihak militer dan golongan Islam banyak yang menolaknya.

### **B. Cita-Cita PKI : Sketsa Utopisme Sosial-Politik**

Mengenai ideologi komunis, Presiden Sukarno, Pemimpin Besar Revolusi berpendapat :

Siapa, - kalau benar-benar ia manusia, dan bukan makhluk tanpa arah -, berani membantah kebenarannya benang merah dalam Manifes Komunis, bahwa sebagian besar dari ummat manusia ini ditindas, di "onderdrukt" dan di "uitgebuit" oleh sebagian yang lain, sehingga akhirnya kaum proletar tak akan kehilangan barang lain daripada rantai belenggunya sendiri. Mereka sebaliknya akan memperoleh satu dunia baru. Hai proletar seluruh dunia, bersatulah .....!<sup>80</sup>

Karenanya alasan tersebut, Sukarno pada 1959 mengumumkan Nasakom, yang memberi dasar pijakan legal terhadap eksistensi PKI. Sedangkan Kaum Kanan - demikian biasa Sukarno menyebut golongan Agama - merupakan kekuatan potensial yang masif dalam menentang penjajahan. Dan Nasionalisme bukan sekedar

<sup>80</sup> *Manusia Dan Masyarakat Baru Indonesia (Civic)* (Departemen P.P. Dan K, 1960).

ideologi hampa tanpa arah dan tujuan, tetapi dasar perjuangan yang visi dan misinya adalah Kemerdekaan bangsa Indonesia dalam arti sepenuhnya, yang bekerja sama dengan berbagai kekuatan lain, sebagai unsur dinamis dalam sebuah bangsa. Artinya, kelompok Islampun tanpa merangkul kelompok lain dalam pergerakan Kemerdekaan akan mengalami kegagalan.

Menurut Sukarno, NASAKOM adalah jiwa yang berisi ketiga kekuatan diatas mana kami berdiri tegak : NAS adalah orang-orang nasionalis yang bukan komunis, A orang agama yang anti komunis dan KOM orang yang beraliran komunis.<sup>81</sup>

Perjuangan Kemerdekaan Indonesia haruslah merupakan kekuatan gabungan dari ketiga ideologi tersebut. Jika ketiga kekuatan itu bergerak sendiri-sendiri maka bukan persatuan yang didapat tetapi perpecahan, dimana yang satu merasa lebih besar dari yang lain. Demikianlah kira-kira menurut Sukarno. Seperti dinyatakannya dalam bukunya *Dibawah Bendera Revolusi : Kesadaran mengenai tragedi penjajahan*, kata digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Sukarno selanjutnya, telah menimbulkan protes diseluruh Asia, karena "Roch Asia" tidak akan mengalah kepada penindasan. Bahkan di Indonesia sudah muncul suatu pergerakan rakyat ; ia telah dimanifestasikan dalam tiga aliran politik, walaupun tujuannya sama – yakni satu aliran nasionalis, satu aliran Islamis, dan satu aliran Marxis. Sekarang menjadi kewajiban semua orang untuk berupaya mempersatukan ketiga aliran itu dan untuk membuktikan bahwa didaerah jajahan mereka tidak perlu bermusuhan satu sama lain. Andaikata saja mereka bersatu, mereka akan merupakan air bah yang tak akan bisa ditahan. Dengan semangat yang tak kunjung padam dan

<sup>81</sup> Cindy Adams, *Bung Karno : Penyambung.....*, 445.



tanpa mengenal putus asa, mereka harus memikul tugas yang besar dan berat ini : sebab kita yakin, bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita kearah terkabulnya impian kita, Indonesia Merdeka.<sup>82</sup>

Menurut penelitian Dahm, Nasakomnya Sukarno didasarkan pada tradisi kebudayaan Indonesia, baik berupa dunia wayang maupun kepercayaan akan datangnya Ratu Adil. Yang embrionya berasal dari akhir tahun 1920-an, ketika Sukarno bergagasan untuk membentuk “Permufakatan Partai Politik Kebangsaan Indonesia”, yakni koalisi antara partai-partai nasionalis, keagamaan dan sosialis pada waktu itu.<sup>83</sup>

Berdasarkan historis materialisme yang telah diuraikan diatas, komunisme mengartikan negara sebagai negara dari suatu kelas. Oleh karena itu, setiap bentuk pemerintahan kapitalis baik dalam bentuk monarki ataupun republik, akan mempertahankan kepentingan kelasnya.

Mereka berpendapat, untuk menyelenggarakan negara dengan penciptaan kehidupan yang makmur bagi rakyat, pada hakikatnya, memeras kaum buruh. Perombakan masyarakat menurut mereka hanya mungkin dilakukan oleh kaum buruh yang terkena pemerasan itu. Oleh karena itu, hendaklah kaum buruh menyadarinya dan kemudian bersatu memperjuangkan nasibnya dengan menggulingkan kelas kapitalis melalui revolusi. Setelah revolusi berhasil, maka kaum buruh sajalah yang memegang tampuk pemerintahan. Dalam pemerintahan itu hak milik akan dihapus,

---

<sup>82</sup> Bernhard Dahm, *Soekarno Dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta : LP3ES, 1987), 77.

<sup>83</sup> *Ibid.*, viii .

sehingga alat produksi berada dalam penguasaan kolektif dan pertentangan-pertentangan kelas ditiadakan.<sup>84</sup>

Dengan demikian, terlihatlah bahwa komunisme mengenakan sistem diktator, yaitu diktator proletariat. Kekuasaan berada ditangan proletariat dan mutlak sifatnya. PKI melalui Aidit, menyusun kekuatan proletar yang akan membuat gerakan massa dan bersifat revolusioner. Ini berarti kaum buruh harus didukung oleh kelompok elite, yakni sebuah organisasi modern yang mengelola semua program-program perjuangan kelas dari atas kebawah dan dari bawah keatas, sebuah partai.

Partai inilah yang pada hakikatnya memegang seluruh kekuasaan ; ideologis, politis, dan organisatoris. Partai ini bersifat monolit yang tidak mentolerir adanya oposisi. Partai adalah satu-satunya kekuasaan yang berhak memberikan pedoman dasar kenegaraan, satu-satunya kekuasaan yang berhak mengambil keputusan dan kebijaksanaan pemerintah dan merupakan bentuk organisasi tertinggi kaum buruh yang membawahi semua organisasi lainnya. Dengan demikian, partai menuntut ditaati secara mutlak oleh segenap anggotanya.

Masyarakat masa depan, menurut PKI, adalah masyarakat tanpa kelas. Untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas itu harus dilakukan dengan revolusi. Dan revolusi harus berisi komponen-komponen buruh dan tani. Kemudian jika revolusi berhasil maka buruh menjadi pemimpin dari masyarakat tanpa kelas itu dan

---

<sup>84</sup> Soerjanto Poespowardojo, "Mengapa Kita Menentang Komunis", dalam Alex Dinuth, *Kewaspadaan Nasional...*, 11.

menguasai alat-alat produksi. Dengan demikian, dalam masyarakat komunis itu akan tercipta suasana hidup baru : damai antara manusia dengan sesamanya.

Dari pokok-pokok gagasan diatas terlihatlah bahwa komunisme menunjukkan gambaran yang utopis. Pertama-pertama mengenai masyarakat tanpa kelas. Bukankah hal itu pemikiran yang nonsens ? Masyarakat seperti itu jelas tidak akan tercipta. Bukan saja karena mustahil direalisasikan melalui sistem kenegaraan tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia.

Masa 1951 – 1957 disebut juga dengan masa percobaan demokrasi karena demokrasi yang diterapkan demokrasi parlementer.<sup>85</sup> Dalam penelitian Ricklefs, masa itu rakyat Indonesia digambarkan sebagai rakyat yang kebanyakan buta huruf, miskin, terbiasa dengan kekuasaan otoriter dan paternalistik, dan tersebar di kepulauan yang sangat luas. Berada dalam posisi yang sulit untuk memaksakan pertanggung jawaban atas perbuatan para politisi di Jakarta. Mereka yang tahu politik hanyalah sekelompok kecil masyarakat perkotaan. Para politisi Jakarta, walaupun menyatakan cita-cita demokrasi mereka, kebanyakan adalah kaum elite yang menganggap diri mereka sebagai pengikut-pengikut dalam suatu budaya perkotaan baru yang istimewa. Mereka bersikap paternalistik terhadap orang-orang yang kurang beruntung jika dibandingkan dengan diri mereka dan kadang-kadang tinggi hati terhadap orang-orang yang, misalnya, tidak dapat berbicara lancar dalam bahasa Belanda. Tanaman indah seperti demokrasi perwakilan hampir tidak dapat tumbuh di bumi semacam itu. Bagaimanapun juga, harus dikatakan bahwa tanggung jawab golongan elite terhadap

---

<sup>85</sup> MC. Ricklefs. *Sejarah Indonesia...*, 355.

ide demokrasi itulah maka kurun waktu 1950 – 1957 merupakan masa yang paling bebas dalam sejarah Indonesia bagi mereka yang berpolitik.<sup>86</sup>

Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar. Perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industri diseluruh penjuru negeri rusak berat. Mungkin yang paling penting ialah bahwa laju pertumbuhan jumlah penduduk meningkat lagi. Diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, pada tahun 1955 berjumlah 85,4 juta jiwa, dan menurut sensus pada tahun 1961 adalah 97,02 juta jiwa. Produksi pangan meningkat, tetapi tidak cukup. Produksi beras pada 1956 adalah 26 persen lebih tinggi daripada produksi pada tahun 1950, tetapi sejumlah beras impor masih tetap diperlukan. Pertanian banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan diantara sejumlah buruh yang jumlahnya meningkat terus. Akan tetapi, banyak dari mereka yang berduyun-duyun ke kota yang tumbuh secara cepat sekali. Pada tahun 1930, 3,8 persen dari jumlah penduduk digolongkan sebagai penduduk perkotaan ; pada tahun 1961 jumlahnya menjadi 14,8 persen. Antara tahun 1945 dan 1955 jumlah penduduk Jakarta meningkat dua kali lipat menjadi 1,8 juta jiwa dan kemudian bertambah lagi menjadi 2,9 juta jiwa pada tahun 1961. pada waktu itu jumlah penduduk dua kota lainnya adalah sekitar satu juta jiwa (Surabaya dan Bandung) dan jumlah penduduk tiga kota lainnya adalah sekitar setengah juta jiwa (Semarang, Palembang, dan Medan).<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, 356.

<sup>87</sup> *Ibid.*

Masyumi mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam dan dianggap merupakan partai yang terbesar dinegara ini. Partai ini tidak terorganisir secara teratur dan mengalami perpecahan utama didalamnya antara para pemimpin Islam tradisional dan modern. Pada 1952 NU dengan sengaja memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai sendiri.

Partai Nasional Indonesia (PNI) dianggap merupakan partai terbesar kedua. Basis utamanya ialah didalam birokrasi dan kalangan para pegawai kantor. Didaerah pedesaan Jawa partai ini memilik daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat muslim nominal (abangan), sebgaiian karena partai ini dianggap sebagai partai Sukarno dan sebagian karena partai ini dianggap merupakan imbbangan utama terhadap keinginan-keinginan politik Islam.

Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dihancurkan namun tidak dilarang pada 1948, hampir siap untuk melakukan pemunculan kembali yang paling menakjubkan dari sejarahnya yang berganti-ganti. Pada mulanya basis PKI terutama adalah kaum buruh perkotaan dan perusahaan pertanian yang diorganisasikan melalui federasi serikat SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang sepenuhnya dikendalikan PKI. Kemudian partai ini melebarkan sayap kesektor-sektor kemasyarakatan lainnya, termasuk kaum tani.<sup>88</sup>

Strategi Aidit bersifat defensif, karena PKI secara luas tidak dipercaya oleh banyak pihak dikalangan elite politik dan militer. Tujuan utamanya ialah melindungi partai ini dari pihak-pihak yang mengharapkan kehancurannya, apapun

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

penyesuaiannya-penyesuaian teoritis atau aliansi-aliansi politik yang mungkin dituntut untuk itu. Aidit sangat berhasil mempertahankan PKI selama hampir lima belas tahun, tetapi usaha ini membawa partai ini kejalan yang aneh. Akhirnya apa yang dipertaruhkan lebih merupakan masa depan PKI sebagai suatu organisasi daripada masa depan kelas buruh atau komunisme sebagai ideologi politik. Bagaimanapun juga, sebagian besar lawan-lawan partai ini memandangnya dalam rangka sikap ideologisnya yang eksklusif dan ancaman-ancaman yang menurut keyakinan mereka ditimbulkan oleh komunisme terhadap agama dan dominasi elite militer dan politik yang masih mapan. Bagi lawan-lawan partai tersebut harus diakui bahwa tak seorangpun dapat mengetahui langkah-langkah apa yang akan diambil oleh PKI seandainya partai ini berhasil berkuasa.

Aksi-aksi sepiahak PKI atau pelaksanaan landreform merupakan gerakan sosial PKI yakni sarana untuk menghilangkan dan melenyapkan kelas tuan tanah (borjuis). Sedangkan kegiatan-kegiatan ditingkat pemerintahan, seperti pembentukan front nasional, dan pemberian suara ditingkat Dewan atau Presiden bagi suatu kebijakan adalah gerakan politik.

Sementara itu, keterasingan sosial petani miskin dalam waktu yang lama dapat menumbuhkan sikap radikal, sehingga masyarakat seperti itu menjadi lebih terbuka bagi pengaruh-pengaruh gerakan radikal dan organisasi revolusioner semacam PKI.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

1. Dalam hal strategi, PKI memanfaatkan sastra – melalui Lekranya – sebagai sarana perjuangan kelasnya. Hal ini bukan kebetulan belaka tetapi PKI medasarkan dirinya pada strategi Nabi Komunis (Lenin) yang pada 1905 menyatakan bahwa sastra harus merupakan komponen partai yang direncanakan dan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan partai ; penulis harus menjadi anggota partai ; penerbitan, pusat-pusat distribusi, toko buku, ruang-ruang baca, perpustakaan-perpustakaan harus dibawah pengawasan partai. Lekra mempergencar ofensifnya bukan saja secara agresif, tapi juga kasar dan brutal. Para seniman-budayawan yang tegas-tegas melawan arus digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Marxisme-Leninisme-Maoisme diserang karya-karyanya, lalu dibelasalah pribadi-pribadinya dimedia massa. Antara lain sasaran mereka Hamka, Usmar Ismail, H.B. Jassin, Sutan Takdir Alisjahbana, Idrus, Asrul Sani, Gajus Siagian, Trisno Sumardjo, serta secara bersamaan juga terhadap yang lebih junior seperti Wiratmo Sukito, Bokor Hutasuhut, Bur Rasuanto, W.S. Rendra, Goenawan Mohammad, Misbach Yusa Biran, B. Sularto, dan seterusnya.<sup>89</sup> Para sastrawan Lekra terus menerus mensosialisasikan jargon-jargom

---

<sup>89</sup> DS. Moeljanto. et. al., *Prahara Budaya*...., 149.

komunis yang bernada provokasi untuk menyebarkan nilai-nilai Marxisme-Leninisme dihati rakyat.

Dipedesaan, PKI menguasai petani diperkotaan mereka menarik kaum buruh dan orang-orang gelandangan dan semua kaum dan golongan bawah yang miskin akibat kekurangan modal atau tidak punya pekerjaan.

2. Buruh dan para pekerja non pertanian, menjadi sasaran agitasi dan propaganda utama PKI di perkotaan terutama kota-kota pelabuhan semacam Surabaya. Menurut PKI, kekuatan buruh telah lama ada, yaitu sejak permulaan gerakan kemerdekaan dikumandangkan pada awal abad ini. Perlawanan buruh pada tahun 1920-an, menurut PKI, haruslah dilihat sebagai manifestasi kesadaran kekuatan progresif tantang jalannya revolusi rakyat Indonesia.

Menurut Lenin, perjuangan buruh bisa lebih cepat tercapai apabila dipadukan dengan perjuangan petani yang juga mengalami pengisapan oleh kaum feodal.

Akan tetapi kelas buruh dan petani ini masih lemah daya intelektualnya. Oleh karena itu, untuk mencapai kebebasan dari kaum pengisap, kaum buruh dan petani harus dipimpin oleh golongan intelektual yang terorganisir, yang mempunyai tingkat disiplin tinggi serta berjiwa revolusioner, yaitu partai komunis.

Sebagai kota pelabuhan yang tidak pernah sepi dari aktifitas perdagangan, Surabaya mempunyai massa buruh yang potensial. PKI melihat bahwa Surabaya harus dikuasai dan digerakkan. Namun PKI pun sadar bahwa pada waktu itu, sudah terdapat ideologi mapan yang menjadi warna khas Surabaya,

yakni partai agama (NU, Masyumi), sehingga PKI mencoba menginfiltrasi kekuatan-kekuatan non komunis itu kemudian mempengaruhinya.

3. Aksi sepihak yang terjadi di Surabaya menunjukkan radikalisme gerakan PKI dalam melaksanakan landreform (penyabotan tanah). Hal ini merupakan refleksi dari suatu perbedaan kelas yang tajam antara tuan tanah dengan kaum tak bertanah sehingga pihak yang kedua ini bertindak sendiri atas nama perjuangan kelas.

Aksi landreform ini (Surabaya) jelas sudah mempunyai sasaran yang jelas dan dengan perencanaan yang matang. Orang-orang PKI mengerti siapa yang akan dijarah tanahnya, kapan harus dimulai dan bagaimana mengakhirinya.

Dalam kenyataannya, aksi sepihak PKI di Surabaya, meski mempunyai sasaran yang jelas tetapi sasaran itu tidak memandang ideologi tertentu.

Mereka (PKI) mempunyai satu tujuan, yakni tuan tanah, yang memiliki tanah melampaui batas harus diserang diambil tanahnya untuk dibagikan kepada yang tidak mempunyai tanah tanpa menimbang hukum adat, tanah waris dan formalitas lain.

Tidak hanya itu, PKI sudah menyentuh wilayah lain dari landreform yakni menyerang kelompok-kelompok agama. Mengapa ? Hal ini karena institusi sosial yang mapan dan mempunyai basis massa kuat di Surabaya adalah kaum agama (NU). Seandainya yang mempunyai basis massa kuat waktu itu adalah kaum nasionalis (PNI), PKI tetap melakukan intimidasi-intimidasi jika

kelompok atau golongan lain tersebut tidak sejalan dengan garis kebijakan partai komunis.

Seiring dengan terjadinya konflik, perdebatan-perdebatan dan perkelahian antara orang-orang PKI dengan Pemuda Ansor di Surabaya, akibat aksi-aksi yang dilakukan PKI, pemerintah kota waktu itu melalui Walikota Murachman SH, terang-terangan memihak PKI (karena orang PKI). Kondisi ini semakin memperparah keadaan. Dimana seharusnya, penguasa berdiri pada pihak yang netral malah terjebak dalam justifikasi terhadap salah satu kelompok yang bermusuhan.

PKI menganggap kalangan agama ini musuh, bukan saja karena mereka menolak landreform tetapi juga karena mereka dianggap sebagai penghalang utama dalam revolusi komunis. Artinya, Aksi Sepihak PKI dalam melaksanakan landreform di Surabaya khususnya, selalu dan terus-menerus mendapat oposan (tentangan) yang tak kalah radikal dengan gerakan PKI itu sendiri.

Dari perolehan suara Pemilu 1955 dapat diketahui bahwa PKI bukanlah kekuatan mayoritas di Surabaya tetapi NU lah yang terbesarnya, karenanya organisasi-organisasi dibawah NU seperti IPPNU, Ansor, dan lain-lain, merasa confident jika menghalangi atau melawan aksi-aksi sepihak PKI. Sehingga jika PKI melancarkan landreform terhadap tuan tanah maka anggota NU pasti memberi perlawanan semampunya dalam usaha melindungi si tuan tanah itu.



## B. Saran-Saran

1. Kajian mengenai gerakan sosial-politik PKI di wilayah perkotaan masih terbilang sedikit. Kalaupun ada hanyalah mendeskripsikan peristiwa secara naratif dan bukan analitis, sehingga kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan berarti bagi penyelidikan-penyelidikan selanjutnya.
2. Batas spatial (Surabaya) ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Surabaya telah menjadi sentra ekonomi yang cukup penting di nusantara sejak abad XIX. Dengan demikian massa buruh, yang menjadi eksponen utama dalam gerakan komunis, dapat dipengaruhi dan dikuasai.
3. Batas temporalnya (1951 – 1966) merupakan sebuah waktu yang menunjukkan satu keterikatan peristiwa yang menghadirkan satu peristiwa sejarah dengan berbagai implikasi-implikasi sosial politiknya. Dipandang dari sudut sosial, masa lima belas tahun ini telah banyak menimbulkan perubahan-perubahan sosial (aksi sepihak) sedangkan dari sudut politik juga mengalami banyak pergantian kabinet.
4. Dari tulisan ini, bisa dikatakan bahwa gerakan komunisme bisa sewaktu-sewaktu muncul melalui organisasi keagamaan sekalipun (bersifat laten) dengan taktik infiltrasinya. Jadi patutlah dicurigai apabila terdapat organisasi yang selalu mengatasnamakan petani dan buruh yang bersifat revolusioner untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- 30 Tahun Indonesia Merdeka 1955 – 1965.** Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1997.
- Adams, Cindy. **Bung Karno : Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.** Jakarta : Tema Baru, 2000.
- Dahm, Bernhard. **Soekarno Dan Perjuangan Kemerdekaan.** Jakarta : LP3ES, 1987.
- Dinuth, Alex. **Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunis : Kumpulan Tulisan Terpilih Tentang Gerakan Komunis dan Bahaya Ekstrem lainnya di Indoensia.** Jakarta : Intermasa, 1997.
- Kahin, George Mc T. **Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.** Jakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Kartodirdjo, Sartono. **Indonesian Historiography.** Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- \_\_\_\_\_ **Keresahan Pedesaan pada Tahun 1960-an : Khususnya tentang kasus di Klaten, Banyuwangi dan Bali.** Jakarta : Djambatan, 1980.
- \_\_\_\_\_ **Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah.** Jakarta : Gramedia, 1993.
- \_\_\_\_\_ **Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme.** Jakarta : Gramedia, 1999.
- Kasdi, Aminuddin. **Kaum Merah Menjarah : Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960 – 1965.** Yogyakarta : Jendela, 2001.
- Kuntowijoyo. **Pengantar Ilmu Sejarah.** Yogyakarta : Bentang, 1999.
- Lindblad, J. Thomas. Ed. **Sejarah Ekonomi Modern Indonesia : Berbagai Tantangan Baru.** Jakarta : LP3ES, 2000.
- Manusia Dan Masyarakat Baru Indonesia (Civic).** Departemen P.P. Dan K, 1960.

Moeljanto, D.S. dan Taufiq Ismail. **Prahara Budaya : Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI DKK.** Bandung : Mizan, 1995.

Nagazumi, Akira. **Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908 – 1918.** Jakarta : Grafiti, 1989.

Noer, Deliar. **Gerakan Modern Islam.** Jakarta : LP3ES, 1996.

Poeze, Harry A. **Tan Malaka : Pergulatan Menuju Republik 1897 – 1925.** Jakarta : Grafiti, 2000.

Pringgodigdo, A.K. **Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia.** Jakarta : Pustaka Rakyat, 1960.

Ricklefs, MC. **Sejarah Indonesia Modern.** Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998.

Sanit, Arbi. **Badai Revolusi : Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur.** Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

Shiraishi, Takashi. **Zaman Bergerak : Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 – 1926.** Jakarta : Grafiti, 1997.

Suhartono. **Sejarah Pergerakan Nasional : Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 – 1945.** Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Sulistyo, Hermawan. **Palu Arit di Ladang Tebu : Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan.** Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2000.

Swantoro, P. **Dari Buku Ke Buku : Sambung Menyambung Menjadi Satu.** Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.